

BUKU I

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



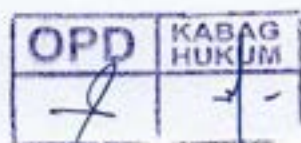
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);



51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
53. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.116.711.074.539,00 (satu triliun seratus enam belas milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.091.795.802.539,00	
b. Belanja Daerah	Rp 1.096.792.411.919,00	
	Defisit/Surplus	Rp. (4.996.609.380,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 24.915.272.000,00	
2. Pengeluaran	Rp. 19.918.662.620,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 4.996.609.380,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan		Rp. -



Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 1.091.795.802.539,00 (satu triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 67.738.029.191,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 16.111.675.421,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.338.534.672,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.653.827.320,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 43.633.991.778,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.024.057.773.348,00 (satu triliun dua puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 950.422.205.500,00 (sembilan ratus lima puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).



- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.635.567.848,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.096.792.411.919,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 763.658.896.869,00 (tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 469.862.442.476,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 250.846.781.189,00 (dua ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.720.929.625,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.183.743.579,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 158.744.965.868,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.359.573.157,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 96.232.666.145,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 38.248.067.133,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 4.645.328.433,00 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 259.331.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 2.150.745.082,00 (dua milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 172.237.804.100,00 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.845.021.100,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 170.392.783.000,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp. 19.918.662.620,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 17.918.662.620,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).



Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;



9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Desember 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 05/1452/LB/2023





**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/777/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
1	Reviu RKPD	705/LHR-23/II/2023	5 JUNI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	10 TAHUN 2023	4 JULI 2023	Telah Sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
3	Reviu KUA-PPAS	15.1.KH.II.02.2023	21 JULI 2023	Tidak Sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat minggu I bulan Juli)
4	Penyampaian rancangan KUA an rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900/475.a/IV.01/2023	14 JULI 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
5	Penyampaian	900/475/IV.01/2023	14 JULI 2023	Telah sesuai

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	1	2	3	4
	rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD			(paling lambat minggu II bulan Juli)
6	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	<u>900/1092/IV.01/2023</u> 09/DPRD- LB/KEP.D/2023 <u>900/1092/IV.01/2023</u> 09/DPRD- LB/KEP.D/2023	7 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)
7	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-OPD	900/522/IV.01/2023	15 AGTS 2023	sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)
5	Reviu RKA-OPD	700/LHR-49/II/2023	27 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)
6	penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/596/IV01/2023	29 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
7	persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<u>24/DPRD-</u> <u>LB/KEP.D/2023</u>	20 NOVEMBER 2023	Telah sesuai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan
8	menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur	900/695/IV.01/2023	22 NOVEMBER 2023	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sesuai ketentuan Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Kebijakan umum terkait dengan Indikator Makro, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Indikator Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menggambarkan target indikator makro yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2024	Sasaran Provinsi Tahun 2024
1	Indeks pembangunan manusia (Poin)	67,90	68,39	69,52	70,6-71,1
2	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	2,58	4,10	5,10	5,0-6,0
3	Angka Kemiskinan (Persen)	12,82	11,71	11,30	10,7-10,2
4	indeks gini (Poin)	0,281	0,284	0,261	0,313-0,293
5	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	2,83	2,10	1,90	4,0-3,79

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.1.1)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- d. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan butir C.1.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- f. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- h. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

3. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sesuai ketentuan butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna

mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- e. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan pendapatan daerah antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai ketentuan butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sesuai ketentuan butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN

**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
DAN KEPENTINGAN UMUM**

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi per 30 Oktober 2023					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	988.918.708.180	892.211.880.002,55	90%	1.092.587.781.039	103.669.072.859	10,48%	122%
Pendapatan Asli Daerah	65.358.127.413	56.692.571.087,55	87%	67.738.029.191	2.379.901.778	3,64%	119%
Pajak Daerah	14.986.447.574	12.562.669.347,00	84%	16.111.675.421	1.125.227.847	7,51%	128%
Retribusi Daerah	2.403.681.111	1.446.686.949,00	60%	2.338.534.672	-65.146.439	-2,71%	162%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	5.653.827.321	5.653.827.320,95	100%	5.653.827.320	-1	0,00%	100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.314.171.407	37.029.387.470,60	88%	43.633.991.778	1.319.820.371	3,12%	118%
Pendapatan Transfer	923.560.580.767	772.519.308.915,00	84%	1.024.849.751.848	101.289.171.081	10,97%	133%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	850.778.668.525	718.634.805.092,00	84%	951.214.184.000	100.435.515.475	11,81%	132%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.781.912.242	53.884.503.823,00	74%	73.635.567.848	853.655.606	1,17%	137%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah							
Pendapatan Hibah							
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							

Berdasarkan tabel diatas, kebijakan Pendapatan Daerah tercantum dalam tabel. 3, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2022	74.228.154.471	1.035.258.101.526	7,17%
PAPBD 2023	65.358.127.413	988.918.708.180	6,61%
R-APBD 2024	67.738.029.191	1.092.587.781.039	6,20%

Tabel 4
Tren Realisasi PAD

Tahun	Anggaran	Realisasi PAD	%
2020	271.336.466.384,51	275.142.995.036,48	101,40
2021	298.472.406.823,00	295.717.851.539,68	99,08
2022	356.014.652.576,00	310.575.860.422,56	87,24
17 November 2023	77.216.807.612,00	292.493.348.566,05	77,54

PAD sebesar Rp67.738.029.191,00 atau setara dengan 6,20% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp16.111.675.421,00 atau setara dengan 1,47% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel sebesar Rp153.973.100,00;
 - b) Pajak Restoran sebesar Rp2.015.067.241,00;
 - c) Pajak Hiburan sebesar Rp7.000.000,00;
 - d) Pajak Reklame sebesar Rp120.929.700,00;
 - e) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.920.000.000,00;
 - f) Pajak Parkir sebesar Rp112.200.000,00;
 - g) Pajak Air Tanah sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp300.000.000,00;
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp5.182.505.380,00;
 - j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp300.000.000,00.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.338.534.672,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp589.568.172,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.548.966.500,00;

c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp200.000.000,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir C.2.a.1).a).(1).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.653.827.320,00 atau setara dengan

0,52% dari dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari PT Bank Lampung, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp43.633.991.778,00 atau setara dengan 3,99% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp1.588.895.000,00 atau setara dengan 0,15% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.751.850.000,00 atau setara dengan 0,16% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp263.925.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).m). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 4) Pendapatan BLUD sebesar Rp38.129.522.418,00 atau setara dengan 3,49% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).n). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 5) Pendapatan Bunga sebesar Rp1.809.020.000,00 atau setara dengan 0,17% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp50.000.000,00 atau setara dengan 0,005% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp204.360,00 atau setara dengan 0,00002% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).j). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp40.575.000,00 atau setara dengan 0,004% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.024.849.751.848,00 atau setara dengan 93,80% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp951.214.184.000,00 atau setara dengan 87,06% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp822.130.716.000,00 atau setara dengan 75,25% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15.326.538.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp543.123.256.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp121.519.087.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp142.161.835.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam

Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

- e. Dana desa sebesar Rp114.547.803.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Insentif Fiskal sebesar Rp14.535.665.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3), butir C.2.b.5).a).(4), butir C.2.b.5).a).(5), dan butir C.2.b.5).a).(6) butir C.2.b.5).a).(7) butir C.2.b.5).a).(8) butir C.2.b.5).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi per 30 Oktober 2023					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
BELANJA DAERAH	1.017.174.385.750	707.263.452.593,99	69,53%	1.097.584.390.419	80.410.004.669	7,91%	155%
Belanja Operasi	723.908.191.300	518.014.919.022,99	71,56%	763.207.638.163	39.299.446.863	5,43%	147%
Belanja Pegawai	432.656.812.843	326.516.790.833,77	75,47%	471.987.251.991	39.330.439.148	9,09%	145%
Belanja Barang dan Jasa	254.637.081.677	173.621.335.025,89	68,18%	248.488.513.468	-6.148.568.209	-2,41%	143%
Belanja Bunga	3.720.929.625	3.032.683.191,00	81,50%	3.720.929.625	0	0,00%	123%
Belanja Subsidi		-	-				-
Belanja Hibah	32.601.367.155	14.674.109.972,33	45,01%	38.965.943.079	6.364.575.924	19,52%	266%
Belanja Bantuan Sosial	292.000.000	170.000.000,00	58,22%	45.000.000	-247.000.000	-84,59%	26%
Belanja Modal	118.299.512.355	56.342.570.411,00	47,63%	159.988.203.074	41.688.690.719	35,24%	284%
Belanja Modal Tanah							-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.927.641.926	13.172.300.550,00	55,05%	19.231.891.020	-4.695.750.906	-19,62%	146%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.483.790.975	12.634.162.513,00	61,68%	97.939.801.145	77.456.010.170	378,13%	775%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.738.072.944	25.839.827.738,00	38,15%	38.495.758.266	-29.242.314.678	-43,17%	149%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510	4.696.279.610,00	78,34%	4.061.421.643	-1.933.584.867	-32,25%	86%
Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000	-	0,00%	259.331.000	104.331.000	67,31%	#DIV/0!
Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895	1.170.144.560,00	72,54%	2.150.745.082	537.603.187	33,33%	184%
Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895	1.170.144.560,00	72,54%	2.150.745.082	537.603.187	33,33%	184%
Belanja Transfer	173.353.540.200	131.735.818.600,00	75,99%	172.237.804.100	-1.115.736.100	-0,64%	131%
Belanja Bagi Hasil	2.183.360.200		0,00%	1.845.021.100	-338.339.100	-15,50%	#DIV/0!
Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000	131.735.818.600,00	76,96%	170.392.783.000	-777.397.000	-0,45%	129%

Tabel. 5
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	458.766.920.120	67.176.128.497	-	-	525.943.048.617	47,92%
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	279.123.653.130	20.678.256.070	-	-	299.801.909.200	27,31%
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	146.267.548.087	8.442.075.800	-	-	154.709.623.887	14,10%
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11.857.421.207	37.648.624.427	-	-	49.506.045.634	4,51%
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	244.302.246	-	-	-	244.302.246	0,02%
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	16.716.610.550	364.332.200	-	-	17.080.942.750	1,56%
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.557.384.900	42.840.000	-	-	4.600.224.900	0,42%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	63.616.723.152	15.445.718.883	-	-	79.062.442.035	7,20%

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
PELAYANAN DASAR						
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	541.153.700	4.845.000	-	-	545.998.700	0,05%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.143.051.250	30.120.000	-	-	4.173.171.250	0,38%
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.902.510.200	-	-	-	2.902.510.200	0,26%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	494.308.000	-	-	-	494.308.000	0,05%
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	13.017.145.512	3.490.090.800	-	-	16.507.236.312	1,50%
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.426.736.250	37.600.000	-	-	4.464.336.250	0,41%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.606.328.930	253.795.000	-	-	3.860.123.930	0,35%
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.099.401.500	-	-	-	5.099.401.500	0,46%

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3.134.222.200	450.375.000	-	-	3.584.597.200	0,33%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.725.650.295	39.920.000	-	-	6.765.570.295	0,62%
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4.837.712.120	88.267.500	-	-	4.925.979.620	0,45%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3.452.654.300	20.800.000	-	-	3.473.454.300	0,32%
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6.091.982.895	-	-	-	6.091.982.895	0,56%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	123.001.000	-	-	-	123.001.000	0,01%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	241.616.800	11.493.450	-	-	253.110.250	0,02%
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.355.024.100	147.580.000	-	-	1.502.604.100	0,14%
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.218.398.600	10.870.832.133	-	-	14.089.230.733	1,28%
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	205.825.500	-	-	-	205.825.500	0,02%

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.407.938.640	74.957.956.100	-	-	102.365.894.740	9,33%
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.012.669.450	30.070.800	-	-	4.042.740.250	0,37%
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.426.836.870	2.458.957.000	-	-	4.885.793.870	0,45%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	15.922.441.670	277.870.300	-	-	16.200.311.970	1,48%
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.605.426.450	69.019.770.000	-	-	71.625.196.450	6,53%
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.440.564.200	3.171.288.000	-	-	5.611.852.200	0,51%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.270.952.141	459.076.110	-	-	109.730.028.251	10,00%
Sekretariat Daerah	72.619.365.936	355.576.110	-	-	72.974.942.046	6,65%
Sekretariat DPRD	36.651.586.205	103.500.000	-	-	36.755.086.205	3,35%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	49.778.834.901	280.370.000	2.150.745.082	172.237.804.100	224.447.754.083	20,45%
Perencanaan	6.423.794.070	30.620.000	-	-	6.454.414.070	0,59%

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
Keuangan	36.007.390.931	226.250.000	2.150.745.082	172.237.804.100	210.622.190.113	19,19%
Kepegawaian	3.991.434.200	-	-	-	3.991.434.200	0,36%
Penelitian Dan Pengembangan	3.356.215.700	23.500.000	-	-	3.379.715.700	0,31%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.336.811.150	101.199.000	-	-	12.438.010.150	1,13%
Inspektorat Daerah	12.336.811.150	101.199.000	-	-	12.438.010.150	1,13%
UNSUR KEWILAYAHAN	11.384.333.440	1.514.729.384	-	-	12.899.062.824	1,18%
Kecamatan	11.384.333.440	1.514.729.384	-	-	12.899.062.824	1,18%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.645.124.619	53.025.100	-	-	30.698.149.719	2,80%
Kesatuan Bangsa Dan Politik	30.645.124.619	53.025.100	-	-	30.698.149.719	2,80%
TOTAL	763.207.638.163	159.988.203.074	2.150.745.082	172.237.804.100	1.097.584.390.419	100,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp525.943.048.617,00 atau setara dengan 47,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 atau setara dengan 27,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 atau setara dengan 14,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.506.045.634,00 atau setara dengan 4,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp244.302.246,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp17.080.942.750,00 atau setara dengan 1,56% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp4.600.224.900,00 atau setara dengan 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp79.062.442.035,00 atau setara dengan 7,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp545.998.700,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp4.173.171.250,00 atau setara dengan 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp2.902.510.200,00 atau setara dengan 0,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp494.308.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp16.507.236.312,00 atau setara dengan 1,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.464.336.250,00 atau setara dengan 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.860.123.930,00 atau setara dengan 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.099.401.500,00 atau setara dengan 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebesar Rp3.584.597.200,00 atau setara dengan 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.765.570.295,00 atau setara dengan 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp4.925.979.620,00 atau setara dengan 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sebesar Rp3.473.454.300,00 atau setara dengan 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.091.982.895,00 atau setara dengan 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp123.001.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp253.110.250,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp1.502.604.100,00 atau setara dengan 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar Rp14.089.230.733,00 atau setara dengan 1,28% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp205.825.500,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp102.365.894.740,00 atau setara dengan 9,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.042.740.250,00 atau setara dengan 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp4.885.793.870,00 atau setara dengan 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp16.200.311.970,00 atau setara dengan 1,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar Rp71.625.196.450,00 atau setara dengan 6,53% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar Rp5.611.852.200,00 atau setara dengan 0,51% dari total belanja daerah sebesar sebesar Rp1.097.584.390.419,00;

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp109.730.028.251,00 atau setara dengan 10,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp72.974.942.046 atau setara dengan 6,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp36.755.086.205 atau setara dengan 3,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp224.447.754.083,00 atau setara dengan 20,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan sebesar Rp6.454.414.070,00 atau setara dengan 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 2) Keuangan sebesar Rp210.622.190.113,00 atau setara dengan 19,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 3) Kepegawaian sebesar Rp3.991.434.200,00 atau setara dengan 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 4) Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.379.715.700,00 atau setara dengan 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp12.438.010.150,00 atau setara dengan 1,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari Belanja Inspektorat Daerah sebesar Rp12.438.010.150,00 atau setara dengan 1,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan sebesar Rp12.899.062.824,00 atau setara dengan 1,18% dari total belanja daerah sebesar Rp12.899.062.824,00 terdiri dari lima belas (15) Kecamatan sebesar Rp12.899.062.824,00 atau setara dengan 1,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp30.698.149.719,00 atau setara dengan 2,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.698.149.719,00 atau setara dengan 2,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp13.651.491.300,00 atau setara dengan 4,55 % dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp7.174.137.500,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp5.011.533.800,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp1.465.820.000,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp5.559.831.401,00 atau setara dengan 3,59 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp1.230.855.308,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp383.463.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp111.324.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp940.206.600,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp269.275.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp652.786.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp375.223.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp27.500.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp507.184.953,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp190.800.000,00;

- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp95.943.540,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) sebesar Rp775.270.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp889.203.657,00 atau setara dengan 1,80% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.506.045.634 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota sebesar Rp549.988.900,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp339.214.757,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp82.502.246,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp4.989.712.150,00 atau setara dengan 29,21% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp17.080.942.750,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp775.771.450,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp308.579.600,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp3.905.361.100,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp328.535.000,00 atau setara dengan 7,14 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp4.600.224.900,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp199.095.000,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten sebesar Rp129.440.000,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar Rp98.584.978.842,00 atau setara dengan 8,98% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp321.701.100,00;
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.453.603.300,00;
 - 3) Program Promosi Penanaman modal dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp415.178.000,00;
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00;
 - 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp3.240.156.700,00;
 - 7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dianggarkan sebesar Rp216.946.600,00;
 - 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dianggarkan sebesar Rp379.161.200,00;
 - 9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dianggarkan sebesar Rp4.335.545.870,00;
 - 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp13.471.450.220,00;
 - 11) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dianggarkan sebesar Rp818.498.200,00;
 - 12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dianggarkan sebesar Rp213.467.000,00;
 - 13) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dianggarkan sebesar Rp291.904.000,00;
 - 14) Program Penyuluhan Pertanian dianggarkan sebesar Rp1.314.451.300,00;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp8.945.432.620,00 atau setara dengan 0,82% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp119.308.870.669,00 atau setara dengan 10,87% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
2. Reformasi sistem perlindungan sosial;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Mengentaskan kemiskinan;
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui PP sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp98.557.146.918,00;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp47.779.259.269,00;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp199.224.000,00;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.199.621.650,00;
- 5) Program Perlindungan Perempuan dianggarkan sebesar Rp120.154.500,00;
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang semula tidak dianggarkan dalam APBD pada APBD-P dianggarkan sebesar Rp65.047.700,00;
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.474.724.700,00;
- 8) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp263.756.000,00;
- 9) Program Penanganan Kerawanan Pangan dianggarkan sebesar Rp28.766.400,00;
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.573.120.630,00;
- 11) Program Administrasi Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp408.612.100,00;
- 12) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dianggarkan sebesar Rp1.654.500.000,00;
- 13) Program Penunjang Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp4.479.017.695,00;
- 14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dianggarkan sebesar Rp331.906.000,00;
- 15) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dianggarkan sebesar Rp1.281.059.200,00;

- 16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp3.330.970.570,00;
 - 17) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp1.420.589.000,00;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp27.648.277.823,00 atau setara dengan 2,52 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui PP yaitu

- 1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dianggarkan sebesar Rp9.586.867.300,00;
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dianggarkan sebesar Rp1.011.884.840,00;
 - 3) Program Pengembangan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp592.347.000,00;
 - 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dianggarkan sebesar Rp3.805.881.150,00;
 - 5) Program Pembinaan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp11.722.379.533,00;
 - 6) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dianggarkan sebesar Rp928.918.000,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan sebesar Rp37.441.979.978,00; atau setara dengan 3,41% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 ; yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui PP sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp6.962.543.539,00;
 - 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dianggarkan sebesar Rp549.988.900,00;
 - 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dianggarkan sebesar Rp522.695.000,00;
 - 4) Program penataan bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp4.168.230.556,00;
 - 5) Program penyelenggaraan penataan ruang dianggarkan sebesar Rp326.777.000,00;
 - 6) Program penyelesaian sengketa tanah garapan dianggarkan sebesar Rp101.430.000,00;
 - 7) Program Pengelolaan Tanah Kosong dianggarkan sebesar Rp392.878.000,00;
 - 8) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dianggarkan sebesar Rp824.576.850,00;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp19.732.481.194,00; atau setara dengan 1,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari PP sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dianggarkan sebesar Rp9.265.682.322,00;
 - 2) Program Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp1.201.116.550,00;
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp28.581.108.279 atau setara dengan 2,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui PP sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dianggarkan sebesar Rp23.039.839.829,00;
- 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dianggarkan sebesar Rp3.805.881.150,00;
- 3) Program Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp1.294.114.600,00;
- 4) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp441.272.700,00;

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	98.584.978.842	8,98%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	8.945.432.620	0,82%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	119.308.870.669	10,87%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	27.648.277.823	2,52%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	37.441.979.978	3,41%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	19.732.481.194	1,80%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	28.581.108.279	2,60%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	340.243.129.405	31,00%
	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419	100,00%

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Barat sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024

tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah Provinsi	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;	117.675.795.060	10,72%
2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;	484.556.779.565	44,15%
3	Pembangunan Infrastruktur;	53.829.253.080	4,90%
4	Reformasi Birokrasi;	376.119.264.433	34,27%
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan	41.092.389.319	3,74%
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.	24.310.908.962	2,21%
	TOTAL	1.097.584.390.419	100,00%

5) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	117.675.795.060	10,72%
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	484.556.779.565	44,15%
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	78.140.162.042	7,12%
4	Reformasi Birokrasi	376.119.264.433	34,27%
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	41.092.389.319	3,74%
	TOTAL	1.097.584.390.419	100,00%

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp301.304.513.300,00; atau 27,45 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	299.801.909.200
	1) Belanja Operasi:	279.123.653.130
	a. belanja pegawai;	233.266.542.700
	b. belanja barang dan jasa;	38.363.435.930
	c. belanja hibah;	7.493.674.500
	d. belanja bantuan sosial.	0
	2) Belanja Modal;	20.678.256.070
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.502.604.100
	1) Belanja Operasi:	1.355.024.100
	a. belanja pegawai;	0
	b. belanja barang dan jasa;	672.524.100
	c. belanja hibah;	682.500.000

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024
	d. belanja bantuan sosial.	0
	2) Belanja Modal;	147.580.000
c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	14.089.230.733
	1) Belanja Operasi:	3.218.398.600
	a. belanja pegawai;	1.983.009.900
	b. belanja barang dan jasa;	1.135.388.700
	c. belanja hibah;	100.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	0
	2) Belanja Modal;	10.870.832.133
d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	
	1) Belanja Operasi:	6.091.982.895
	a. belanja pegawai;	3.920.145.795
	b. belanja barang dan jasa;	1.146.837.100
	c. belanja hibah;	1.025.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-
	2) Belanja Modal;	-
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	
	1) Belanja Transfer:	0
	Belanja bantuan keuangan	
	2) Sub Kegiatan pada OPD	
	dst	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	301.304.513.300
3.	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,45%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 atau setara dengan 99,50% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp233.910.040.000,00 atau setara dengan 77,63% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp301.304.513.300,00;

- 2) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp65.805.301.200,00 atau 21,84% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp301.304.513.300,00;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 atau setara dengan 14,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD
9. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
12. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
14. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
15. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
17. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
18. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

19. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. RSUD Alimuddin Umar

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peningkatan Pelayanan BLUD;
9. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
12. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:
 - a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - (1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - (2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - (3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - (4) konsumsi TTD ibu hamil;
 - (5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - (6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - (7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - (8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
 - (9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);

- (10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
- (11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;
- c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - (1) Tuberkulosis (TBC);
 - (2) Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - (3) Malaria;
 - (4) Penyakit menular lainnya;
- d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - (1) Diabetes Melitus;
 - (2) Hipertensi;
 - (3) Penyakit tidak menular lainnya;
- e) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
 - (1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - (2) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;
 - (3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - (4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - (5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);
- f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:
 - (1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - (2) perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu;
 - (3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*);
 - (4) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;
 - (5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas;
 - (6) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp13.313.360.000,00 atau setara dengan 12% dari total anggaran kesehatan sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

c. Anggaran Infrastruktur

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a. belanja bagi hasil	1.845.021.100

	b. bantuan keuangan	170.392.783.000
	Jumlah (a+b)	172.237.804.100
3.	Selisih (1-2)	925.346.586.319
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	370.138.634.528

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2024
1.	a) Belanja Modal	
	1) Tanah	
	2) Peralatan dan Mesin	19.231.891.020
	3) Gedung dan Bangunan	97.939.801.145
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	38.495.758.266
	5) Aset tetap lainnya	4.061.421.643
	6) Aset lainnya	259.331.000
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
	c) Belanja pemeliharaan	6.586.244.300
2.	a) Belanja Hibah	38.965.943.079
	b) Belanja Bantuan Sosial	45.000.000
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	205.585.390.453
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	32%

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp925.346.586.319,00 sesuai ketentuan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diluar belanja pegawai sebesar Rp5.188.316.050,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp7.249.694.100,00 atau setara dengan 0,66 % dari total belanja daerah; dan
- 2) Alokasi belanja pada OPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp5.188.316.050,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah:

Antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.654.009.850,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp3.013.646.500,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp770.353.800,00

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 sesuai ketentuan butir E.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian

integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir E.2.c.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.991.434.200,00 atau setara dengan 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp1.702.315.200,00 atau setara dengan 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; dan
- 2) Alokasi belanja pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.289.119.000,00 atau setara dengan 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00:

antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.697.319.600,00;
- 2) Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.294.114.600,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp1.611.167.600,00 atau setara dengan 10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp16.111.675.421,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp233.853.500,00 atau setara dengan 10,00% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.338.534.672,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp55.844.980.000,00 atau setara dengan 10,00% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir C.3.d.2).6).(9). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan sebesar Rp9.671.246.298,00 atau setara dengan 37,5% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp25.789.990.128,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir C.2.a.1).p).(5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp227.799.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader

Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lampung Barat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3,652,087,650,00 atau setara dengan 0,33 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial tidak dianggarkan untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp389.244.825.522,00 atau setara dengan 95,29% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp408.476.716.542,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipta Kerja dan sesuai ketentuan butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- 5) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
- 6) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

dianggarkan sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

dianggarkan sebagaimana maksud butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp265.825.000,00, dianggarkan sesuai ketentuan butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp100.000.000,00 sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.609.400.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp248.488.513.468,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.203.527.000,00;
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp380.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp61.401.000,00.

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s.8). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

k. Penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp28.472.031.230,00;

- 2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp3.342.360.000,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.722.658.260,00;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp3.933.800.510,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp763.207.638.163,00 atau setara dengan 69,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp471.987.251.991,00 atau setara dengan 43,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

A. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp331.282.665.271,00 atau setara dengan 30,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp12.114.460.200,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.13 sebagai berikut:

Tabel.13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	250.437.368.902
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.639.998.501
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.469.380.000
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.661.311.700
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.227.473.102
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.608.323.600
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	66.253.518.000
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	404.163.000
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.119.518.000
2	Jumlah Penerimaan	422.821.054.805
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	16.912.842.192,20
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	12.114.460.200
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	4.798.381.992

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp16.912.842.192,20 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp4.798.381.992,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp72.000.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan	
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000

	d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
	e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000
2		Jumlah Penerimaan	2.155.267.700
3		Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	86.210.708
4		Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	72.000.000
		Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	-14.210.708

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp86.210.708,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp14.210.708,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sebesar Rp2.669.520,00, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.278.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga	5.184.100

	KDH/WKDH	
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	857.500
2	Jumlah Penerimaan	70.319.600
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	2.812.784
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	2.669.520
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	-143.264

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp2.812.784,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp143.264,00.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp602.251.246,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.806.753.834,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp602.049.685,36 atau setara dengan 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp250.437.368.902,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.201.560,64;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.803.149.056,09 atau setara dengan 0,72% dari gaji pokok sebesar Rp250.437.368.902,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp3.604.777,91.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan

yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp124.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp301.656.000,00.

dianggarkan kepada:

- (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir 3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

2. Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, yang diuraikan pada:

- a) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dianggarkan;
- b) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK tidak dianggarkan;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pematangan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp14.811.233.300,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp782.040.000,00; sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2024	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	32	1.575.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	35	55.860.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)		782.040.000
Alokasi uang representasi pada APBD			782.040.000
Selisih lebih bayar			0

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.133.958.000,00; alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau setara dengan 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp124.784.100,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00; telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	35	6.300.000
	Jumlah Pagu		2.646.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		2.646.000.000
3	Selisih		0

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp661.500.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18

Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 (1)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	35	6.300.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		661.500.000
	Selisih		0

Berdasarkan tabel diatas, telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp3.916.800.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.761.600.000,00, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00; telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 sebagai berikut

Tabel 19
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
2	Wakil Ketua DPRD	1.5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	110.880.000
	Alokasi uang representasi pada APBD	110.880.000
	Selisih	0

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau setara dengan 0,59% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.111.675.421,00 telah memenuhi alokasi anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp52.608.323.600,00 atau setara dengan 4,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp52.608.323.600,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp16.800.000,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp71.079.811.000,00 atau setara dengan 6,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp66.253.518.000,00;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.119.518.000,00;
 - c) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.354.212.000,00
 - d) Belanja Honorarium sebesar Rp948.400.000,00;
- yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp944.790.000,00;
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.360.000,00
- (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.250.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp248.488.513.468,00 atau setara dengan 22,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp45.355.456.898,00 atau setara dengan 4,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp45.260.161.118,00 atau setara dengan 4,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.814.668.944,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp4.748.061.300,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp2.094.085.000,00;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp166.220.000,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp568.491.095,00;

- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp249.237.000,00;
- (7) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp1.459.944.414,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp6.728.395.000,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp1.522.137.500,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp2.599.410.000,00;
- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.017.624.000,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp48.575.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp185.000.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.711.394.107,00;
- b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.841.933.311,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.628.072.500,00 atau setara dengan 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.570.260.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp733.000.000,00;
 - (2) Belanja Beasiswa sebesar Rp837.260.000,00;
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.057.812.500,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian Objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp4.057.812.500,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RPD, dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp78.736.157.992,00 atau setara dengan 7,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.002.638.046,00 atau setara dengan 4,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.088.350.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp645.800.046,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp643.950.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebesar Rp30.960.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.877.345.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2.522.400.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp409.960.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp76.200.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp193.600.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.873.600.000,00;

- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp1.605.620.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp1.237.260.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp641.100.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp446.400.000,00;
- (15) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebesar Rp129.600.000,00;
- (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp5.030.900.000,00;
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.478.611.000,00.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp15.798.605.756,00 atau setara dengan 1,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada:

- (1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp2.257.725.080,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp215.006.400,00;

dianggarkan bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.432.871.200,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp297.842.892,00;
- (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp235.505.784,00;

dianggarkan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.901.953.740,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.066.328.740,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp3.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp175.725.000,00;

- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.753.575.000,00 atau setara dengan 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp143.750.000,00;
- (4) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp1.049.200.000,00;
- (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp295.000.000,00 atau setara dengan 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp240.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta sesuai ketentuan butir C.3.b.8).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.502.664.450,00 atau setara dengan 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebesar Rp773.664.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp150.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebesar Rp165.000.000,00;

- (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebesar Rp133.500.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung sebesar Rp1.280.500.450,00.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.497.930.000,00 atau setara dengan 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp15.000.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebesar Rp670.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp171.930.000,00;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen sebesar Rp200.000.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp1.441.000.000,00.

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.983.791.000,00 atau

setara dengan 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp2.754.401.000,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp47.500.000,00;
- (3) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp181.890.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp4.273.527.600,00; dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang

terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.586.244.300,00 atau setara dengan 0,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp228.110.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.078.696.300,00 atau setara dengan 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp101.410.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp3.495.098.300,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp751.525.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Alat Kalibrasi sebesar Rp71.713.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp219.540.000,00;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp34.500.000,00;
 - c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp670.474.000,00 atau setara dengan 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp461.779.250,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp128.694.750,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp30.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp50.000.000,00;

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.794.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp502.450.000,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.794.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp98.344.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp502.450.000,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.170.000,00 atau setara dengan 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebesar Rp8.170.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp49.799.781.130,00 atau setara dengan 4,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp25.940.358.500,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp8.182.101.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp14.438.732.630,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.238.589.000,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir C.3.a.2).(4).(a).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.940.758.000,00 atau setara dengan 5,40% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp72.974.942.046,00;
- b) Sekretariat DPRD sebesar Rp8.666.642.000,00 atau setara dengan 23,58% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp36.755.086.205,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.570.260.000,00 atau setara dengan 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian

objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.570.260.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp733.000.000,00 dapat dianggarkan dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c. Belanja Hibah

- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.222.159.500,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar sebesar Rp6.222.159.500,00;
- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.068.655.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.068.655.000,00;
- 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp50.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp50.000.000,00;
- 4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp155.000.000,00 yang tercantum pada;
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp135.000.000,00;

- b. Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp20.000.000,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dari total belanja dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada

SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp671.254.272,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- d. Bantuan Sosial sebesar Rp45.000.000,00 atau setara dengan 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang

diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebesar Rp45.000.000,00.

3. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp159.988.203.074,00 atau setara dengan 14,58% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.b.2) dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- b) Standar barang, standar kebutuhanan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.231.891.020,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp113.697.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

- 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp5.168.132.000,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp5.018.132.000,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp150.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp366.452.500,00 atau setara dengan 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.613.585.860,00 atau setara dengan 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp483.565.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.053.220.860,00;
 - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp76.800.000,00.
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp132.686.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* sebesar Rp110.536.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp18.400.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*.
- 6) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.655.958.200,00 atau setara dengan 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp1.179.087.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp476.871.200,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.939.801.145,00 atau setara dengan 8,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp96.688.601.145,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp2.791.889.545,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp10.772.016.000,00;

- (3) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp940.750.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp2.312.615.600,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp38.495.758.266,00 atau setara dengan 3,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp34.511.544.966,00 atau setara dengan 3,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp32.092.344.966,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp2.419.200.000,00;
 - 2) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp1.470.000.000,00 atau setara dengan 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.061.421.643,00 atau setara dengan 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.917.350.000,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp229.175.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

- a) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp259.331.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.930.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.930.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp197.930.000,00.

dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.917.350.000,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp1.917.350.000,00 yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp69.498.000,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebesar Rp1.847.852.000,00.
- d. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp229.175.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp5.100.000,00 yang tercantum pada Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Umum sebesar Rp5.100.000,00;

2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp191.700.000,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp2.475.000,00;
- b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah sebesar Rp168.300.000,00;
- c) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp203.925.000,00;

dianggarkan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai butir C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.150.745.082,00 atau setara dengan 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp172.237.804.100,00 atau setara dengan 15,69% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.845.021.100,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.611.167.000,00 atau setara dengan 10,00% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp16.111.675.421,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp233.853.500,00 atau setara dengan 10,00% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.338.534.672,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- 3) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp170.392.783.000,00 atau setara dengan 15,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp170.392.783.000,00 atau setara dengan 15,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana

tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan butir C.3.d.b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah sebesar Rp4.996.609.380,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Pembiayaan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Semester I P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PEMBIAYAAN DAERAH	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.259.068.190	52%	52%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.259.068.190	52%	52%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.259.068.190	52%	52%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	-	-	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620	8.959.076.170	45%	19.918.662.620	-	100%	222%
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	0	0%	2.000.000.000	-	100%	#DIV/0!
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620	8.959.076.170,00	50%	17.918.662.620	-	100%	200%

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp19.918.662.620,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp0,00 atau setara dengan 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp19.918.662.620,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp17.918.662.620,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir C.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SERTA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD 2024	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	289	1.479.466.472.800	289	1.239.688.874.546	266	1.097.584.390.419
2.	Jumlah Kegiatan	707		697		638	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	2383		2294		2142	

- Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih rendah daripada RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA serta PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp1.398.277.800.573,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 293 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sejumlah 266 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- D. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.19.1/435/SJ dan Nomor: 900.I.9.I/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman kepada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- F. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:
1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- G. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 masih terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal

proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

H. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menganggarkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pematangan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

I. Pemerintah Lampung Barat agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.358.204.968,00 (per November 2023) serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2024 sebesar Rp27.605.696.078,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Iuran JKN	Rp3.267.772.200,00
2) Iuran Jamkes PBPU	Rp78.960.000,00
3) Iuran Jamkes Kades & Perangkat Desa	Rp11.472.768,00
4) Proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023	Rp27.605.696.078,00

J. Penyampaian rancangan KUA PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP tanggal 14 Juli 2023, sedangkan Laporan Hasil Review (LHR) terhadap dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD diterbitkan tanggal 21 Juli 2023. Untuk itu pada penyusunan APBD berikutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan review terhadap dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD sebelum dilakukan Penyampaian rancangan KUA PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan butir D.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

K. Pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dianggarkan pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan butir C.2.a.3)n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan ketentuan butir C.2.a.1)n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- L. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp471.978.251.991,00 atau setara dengan 36,83% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- M. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja di 54 OPD pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan dokumen PPAS. Penambahan atau pengurangan pagu dapat dilakukan apabila terdapat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran OPD dimaksud dikembalikan pada Pagu KUA, PPAS dan selisih lebih anggaran dialihkan untuk mendanai mandatory spending yang belum terpenuhi serta Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- N. Terdapat selisih kurang Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp4.798.381.991,00, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- O. Terdapat selisih kurang Iuran Jaminan Kesehatan DPRD sebesar Rp14.210.708,00, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

- P. Terdapat kesalahan penganggaran rekening Rincian Objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan yang dianggarkan pada Objek Lain-lain PAD yang sah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan Rincian Objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dianggarkan pada Objek Retribusi Jasa Umum dengan Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan butir C.2.a.1)a)(2)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pasal 27 ayat (1)a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Q. Nomenklatur jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar disesuaikan dengan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, maka pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- R. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
1. Diktum Mengingat, angka 18 Lembar pengundangan agar diperbaiki.
 2. Batang Tubuh.
 - a. Pasal 8 ayat (6), frasa huruf f diubah menjadi frasa huruf e.
 - b. Pasal 16 angka 9 diubah menjadi:
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 3. Lampiran :
 - a. Lampiran I, setelah judul lampiran tambahkan frasa "TAHUN ANGGARAN 2024".
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Lampiran II, kolom surplus/(defisit) dan kolom persentase (%) pada tabel lampiran dihapus.
 - c. Lampiran III.
 - 1) Frasa PENDAPATAN DAERAH pada kolom atas tabel lampiran dihapus.
 - 2) Pada kolom (dasar hukum) cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar

hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

d. Lampiran IV, sebelum judul lampiran tambahkan frasa KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

e. Lampiran IX, judul diubah menjadi :

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN
PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS
DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan amanat Pasal 16 Rancangan Peraturan Daerah.

II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

1. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.

2. Batang Tubuh.

a. Pasal 5.

1) ayat (8) diubah menjadi :

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) ayat (9), frasa ayat (1) huruf f diubah menjadi frasa ayat (1) huruf h.

3) ayat (10), frasa ayat (1) huruf h diubah menjadi frasa ayat (1) huruf i.

b. Pasal 8.

1) ayat (8), frasa ayat (1) huruf e diubah menjadi frasa ayat (1) huruf g.

2) ayat (9), frasa ayat (1) huruf f diubah menjadi frasa ayat (1) huruf h.

3. Lampiran :

a. Lampiran I, judul diubah menjadi :

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

b. Lampiran II, kolom nomor 4 (DASAR HUKUM) pada tabel lampiran diubah menjadi kolom PENJELASAN, dengan mencantumkan:

1) dasar hukum pendapatan.

2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman APBD TA 2024.

- c. Lampiran IV, pada pojok kanan bawah akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
- S. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

ARINAL DJUNAI



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 26/DPRD-LB/KEP.D/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR LAMPUNG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 setelah dievaluasi Gubernur untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/777/VI.02/HK/2023 tertanggal 12 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah disempurnakan sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur Lampung dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,


EDIN NOVIAL

Paraf	
Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat	
Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat	
Nomor	: 26 /DPRD-LB/Kep.D/2023
Tanggal	: 18 Desember 2023
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO	1. 
2. Wakil Ketua II: ERWANSYAH	2. 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG



PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat
 Nomor : 26 /DPRD-LB/KEP.D/2023
 Tanggal : Desember 2023
 Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Hasil Evaluasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG				PENJELASAN TINDAK LANJUT	
1.				2.	
1. KEBIJAKAN UMUM					
Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:					
A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:					
Tabel 1					
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD					
No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan	
		Nomor	Tanggal		
	1	2	3	4	
1	Reviu RKPD	705/LHR-23/II/2023	5 JUNI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)	
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	10 TAHUN 2023	4 JULI 2023	Telah Sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)	
3	Reviu KUA-PPAS	15.1.KH.II.02.2023	21 JULI 2023	Tidak Sesuai. (sebelum Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat minggu I bulan Juli)	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG				PENJELASAN TINDAK LANJUT	
1.				2.	
4	Penyampaian rancangan KUA an rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900/475.a/IV.01/2023	14 JULI 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)	
5	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	900/475/IV.01/2023	14 JULI 2023	Telah sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli)	
6	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	900/1092/IV.01/2023 09/DPRD- LB/KEP.D/2023 900/1092/IV.01/2023 09/DPRD- LB/KEP.D/2023	7 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)	
7	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-OPD	900/522/IV.01/2023	15 AGTS 2023	sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)	
5	Reviu RKA-OPD	700/LHR-49/II/2023	27 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus)	
6	penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/596/IV01/2023	29 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	
7	persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	24/DPRD- LB/KEP.D/2023	20 NOVEMBER 2023	Telah sesuai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan	
8	menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan	900/695/IV.01/2023	22 NOVEMBER 2023	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG				PENJELASAN TINDAK LANJUT	
1.				2.	
	Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur				
<p>Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sesuai ketentuan Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>				<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk kedepannya dalam menyusun APBD akan berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p>	
<p>B. Kebijakan umum terkait dengan Indikator Makro, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>					
<p>1. Indikator Makro</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menggambarkan target indikator makro yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:</p>				<p>Penyusunan APBD sudah berdasarkan pada target indikator makro yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Barat</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Tabel 2. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2024	Sasaran Provinsi Tahun 2024
1	Indeks pembangunan manusia (Poin)	67,90	68,39	69,52	70,6-71,1
2	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	2,58	4,10	5,10	5,0-6,0
3	Angka Kemiskinan (Persen)	12,82	11,71	11,30	10,7-10,2
4	indeks gini (Poin)	0,281	0,284	0,261	0,313-0,293
5	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	2,83	2,10	1,90	4,0-3,79

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan

Penyusunan Target Pendapatan sudah berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh target Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan penerimaan daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD telah dianggarkan sesuai butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
d. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan butir C.1.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah telah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek sesuai ketentuan butir C.1.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Terimakasih atas sarannya, hal ini akan menjadi perhatian kami
f. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terimakasih atas sarannya, hal ini akan menjadi perhatian kami
g. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-	Penganggaran pendapatan bagian laba atas penyertaan modal telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
h. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
3. Kebijakan Belanja Daerah	
a. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami
b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sesuai ketentuan butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>c. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami</p>
<p>d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami</p>
<p>e. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan pendapatan daerah antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami</p>
<p>f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, hal ini menjadi perhatian dan pedoman kami</p>
<p>4. Kebijakan Pembiayaan Daerah</p> <p>a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai ketentuan butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sesuai ketentuan butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	PAPO Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi per 30 Oktober 2023					
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=5/2	8=5/3
PENDAPATAN DAERAH	968.518.798.180	892.211.890.002,58	90%	1.092.587.781.039	124.068.972.859	10,48%	122%
Pendapatan Asli Daerah	66.288.127,413	56.682.971.087,58	87%	67.298.029.291	2.379.901.778	3,64%	119%
Piada Daerah	14.266.447,374	12.962.649.247,00	84%	16.111.675.421	1.120.227.847	7,81%	126%

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Realisasi Daerah	2.403.691.111	1.446.686.949,00	60%	2.328.331.672	-43.346.439	-2,71%	162%
Realisasi Pengalokasian Ekspansi Daerah yang di gantikan	3.633.827.321	3.633.827.320,96	100%	3.633.827.320	-1	0,00%	100%
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.314.171.452	37.028.387.470,80	88%	43.633.992.718	1.309.820.371	3,12%	139%
Pendapatan Transfer	923.560.586.797	772.818.308.918,00	84%	1.004.549.751.948	101.289.171.061	10,97%	132%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.718.498.325	718.634.803.082,00	84%	901.214.184.030	100.433.303.473	11,81%	132%
Pendapatan Transfer Jalar Daerah	72.781.912.242	33.894.303.823,00	74%	73.633.367.848	80.605.606	1,17%	137%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah							
Pendapatan Hibah							
Lain Lain Pendapatan Selain dengan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan							

Berdasarkan tabel diatas, kebijakan Pendapatan Daerah tercantum dalam tabel. 3, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3

Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2022	74.228.154.471	1.035.258.101.526	7,17%
PAPBD 2023	65.358.127.413	988.918.708.180	6,61%
R-APBD 2024	67.738.029.191	1.092.587.781.039	6,20%

Tabel 4

Tren Realisasi PAD

Tahun	Anggaran	Realisasi PAD	%
2020	271.336.466.384,51	275.142.995.036,48	101,40
2021	298.472.406.823,00	295.717.851.539,68	99,08
2022	356.014.652.576,00	310.575.860.422,56	87,24
17 November 2023	77.216.807.612,00	292.493.348.566,05	77,54

PAD sebesar Rp67.738.029.191,00 atau setara dengan 6,20% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 diuraikan sebagai berikut:

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 16.111.675.421,00 atau setara dengan 1,47% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 yang diuraikan sebagai berikut:	
a) Pajak Hotel sebesar Rp153.973.100,00;	
b) Pajak Restoran sebesar Rp2.015.067.241,00;	
c) Pajak Hiburan sebesar Rp7.000.000,00;	
d) Pajak Reklame sebesar Rp120.929.700,00;	
e) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.920.000.000,00;	
f) Pajak Parkir sebesar Rp112.200.000,00;	
g) Pajak Air Tanah sebesar Rp3.500.000.000,00;	
h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp300.000.000,00;	
i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp5.182.505.380,00;	
j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp300.000.000,00.	
2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.338.534.672,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 yang diuraikan sebagai berikut:	
a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp589.568.172,00;	
b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.548.966.500,00;	
c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp200.000.000,00.	
<p>Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	
<p>Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.</p>	
<p>f) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.</p>	
<p>Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>	<p>Penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok telah dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang</p>
<p>Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk penganggran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir C.2.a.1).a).(1).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.653.827.320,00 atau setara dengan 0,52% dari dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.</p> <p>Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari PT Bank Lampung. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; <p>dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b). Lampiran Peraturan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini menjadi perhatian kami</p>
<p>c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp43.633.991.778,00 atau setara dengan 3,99% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.</p> <p>Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jasa Giro sebesar Rp1.588.895.000,00 atau setara dengan 0,15% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.751.850.000,00 atau setara dengan 0,16% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 	<p>Terimakasih atas saran dan masukannya , hal ini akan menjadi perhatian</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>3) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp263.925.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).m). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>4) Pendapatan BLUD sebesar Rp38.129.522.418,00 atau setara dengan 3,49% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).n). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>5) Pendapatan Bunga sebesar Rp1.809.020.000,00 atau setara dengan 0,17% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp50.000.000,00 atau setara dengan 0,005% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>7) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp204.360,00 atau setara dengan 0,00002% dari total pendapatan daerah</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).j). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp40.575.000,00 atau setara dengan 0,004% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>2. Pendapatan Transfer</p>	
<p>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.024.849.751.848,00 atau setara dengan 93,80% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.092.587.781.039,00.</p>	
<p>Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp951.214.184.000,00 atau setara dengan 87,06% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp822.130.716.000,00 atau setara dengan 75,25% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:</p>	
<p>a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15.326.538.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;</p>	
<p>b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp543.123.256.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp121.519.087.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp142.161.835.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	
e. Dana desa sebesar Rp114.547.803.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	
f. Insentif Fiskal sebesar Rp14.535.665.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.	
<p>Rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3), butir C.2.b.5).a).(4), butir C.2.b.5).a).(5), dan butir C.2.b.5).a).(6) butir C.2.b.5).a).(7) butir C.2.b.5).a).(8) butir C.2.b.5).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p>	<p>Terimakasih atas saran dan masukannya , hal ini akan menjadi perhatian kami</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah sebesar Rp. 1.097.584.390.419,00, dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi per 30 Oktober 2023					
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=5/2	8=5/3
BELANJA DAERAH	1.017.174.385.750	707.263.452.993,99	69,53%	1.097.584.390.419	80.410.004.669	7,9%	100%
Belanja Operasi	723.908.191.300	518.014.909.022,99	71,56%	783.207.618.163	39.299.446.863	5,43%	147%
Belanja Pegawai	412.056.812.843	326.516.790.813,77	79,24%	471.907.251.991	39.130.419.148	9,09%	145%
Belanja Barang dan Jasa	254.637.081.677	171.621.135.025,89	67,41%	248.498.113.468	-6.148.968.209	-2,47%	141%
Belanja Bunga	3.720.929.625	3.012.681.161,00	81,21%	3.720.929.625	0	0,00%	127%
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	32.601.367.153	14.674.101.872,33	45,01%	38.905.943.079	6.304.575.924	16,52%	266%
Belanja Bantuan Sosial	292.000.000	170.000.000,00	58,22%	45.000.000	-247.000.000	-84,59%	28%
Belanja Modal	118.299.512.355	56.342.570.411,00	47,63%	159.988.203.074	41.688.690.719	35,24%	284%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Perakitan dan Mesin	23.627.641.926	11.171.300.591,00	47,28%	18.201.891.020	-4.695.750.906	-25,74%	146%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.481.790.975	12.614.182.913,00	61,64%	67.919.801.145	77.456.010.170	378,13%	773%
Belanja Modal Jalan, Damang dan Jembatan	67.738.972.944	25.619.827.718,00	38,11%	38.495.758.266	-29.242.144.678	-43,17%	149%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.899.006.510	4.056.279.110,00	104,29%	4.011.421.643	-4.933.584.867	-12,29%	86%

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Belanja Modal Aneka Lainnya	255.000.000	-	0,00%	259.330.000	154.330.000	67,31%	400,00%
Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895	1.170.144.500,00	72,54%	2.150.745.082	517.603.187	23,93%	100%
Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895	1.170.144.500,00	72,54%	2.150.745.082	517.603.187	23,93%	100%
Belanja Transfer	173.253.540.200	131.735.818.600,00	75,99%	172.237.804.100	-1.115.736.100	-0,64%	100%
Belanja Bagi Hasil	2.181.260.200	-	0,00%	1.845.021.300	-338.239.100	-15,30%	400,00%
Belanja Bantuan Keuangan	171.170.280.000	110.735.818.600,00	64,69%	170.181.783.000	-77.297.000	-0,45%	100%

Tabel 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	458.766.920.120	67.176.128.497	-	-	525.943.048.617	47,92%
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	279.123.653.120	20.678.256.070	-	-	299.801.909.200	27,31%
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	146.267.548.087	8.442.075.800	-	-	154.709.623.887	14,10%
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.857.421.207	37.648.624.427	-	-	49.506.045.634	4,51%
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	244.302.246	-	-	-	244.302.246	0,22%
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	16.716.610.550	364.302.200	-	-	17.080.912.750	1,56%
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.557.384.900	42.840.000	-	-	4.600.224.900	0,42%

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

1.

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	63.616.723.152	15.445.718.883	-	-	79.062.442.035	7,20%
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	541.153.700	4.845.000	-	-	545.998.700	0,05%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.143.051.250	30.120.000	-	-	4.173.171.250	0,38%
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.902.510.200	-	-	-	2.902.510.200	0,26%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	494.308.000	-	-	-	494.308.000	0,05%
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	13.017.145.512	3.490.090.800	-	-	16.507.236.312	1,50%
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.426.736.250	37.600.000	-	-	4.464.336.250	0,41%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.606.328.930	253.795.000	-	-	3.860.123.930	0,33%

PENJELASAN TINDAK LANJUT

2.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

1.

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Terduga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.099.401.500	-	-	-	5.099.401.500	0,46%
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3.134.222.200	430.375.000	-	-	3.564.597.200	0,33%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.725.630.295	39.920.000	-	-	6.765.570.295	0,62%
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4.837.712.120	88.267.500	-	-	4.925.979.620	0,45%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3.452.654.300	20.800.000	-	-	3.473.454.300	0,32%
Urusan Pemerintahan Bidang Kepertanian Dan Olahrag	6.091.982.895	-	-	-	6.091.982.895	0,56%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	123.001.000	-	-	-	123.001.000	0,01%
Urusan Pemerintahan Bidang Peradilan	241.616.800	11.493.450	-	-	253.110.250	0,02%
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.355.024.100	147.580.000	-	-	1.502.604.100	0,14%

PENJELASAN TINDAK LANJUT

2.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

1.

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Tertaga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.218.398.600	10.870.832.933	-	-	14.089.230.733	1,28%
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	205.825.500	-	-	-	205.825.500	0,02%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.407.938.640	74.957.956.100	-	-	102.365.894.740	9,33%
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.012.669.450	30.070.800	-	-	4.042.740.250	0,37%
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.426.836.870	2.458.957.000	-	-	4.885.793.870	0,45%
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	15.922.441.670	277.870.300	-	-	16.200.311.970	1,48%
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.605.426.450	69.019.770.000	-	-	71.625.196.450	6,53%
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.440.564.200	3.171.288.000	-	-	5.611.852.200	0,51%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.270.952.141	459.076.110	-	-	109.730.028.251	10,00%
Sekretariat Daerah	72.619.365.936	355.576.110	-	-	72.974.942.046	6,65%
Sekretariat Dptd	36.651.586.205	103.500.000	-	-	36.755.086.205	3,35%

PENJELASAN TINDAK LANJUT

2.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Operasi (Rp.)	Modal (Rp.)	Tidak Tertaga (Rp.)	Transfer (Rp.)	Jumlah Belanja (Rp.)	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	49.778.834.901	280.370.000	2.150.745.082	172.237.804.100	224.447.754.083	20,45%
Perencanaan	6.423.794.070	30.620.000	-	-	6.454.414.070	0,59%
Keuangan	36.007.390.931	226.250.000	2.150.745.082	172.237.804.100	210.622.190.113	19,19%
Kepegawaian	3.991.434.200	-	-	-	3.991.434.200	0,36%
Perediaan Dan Pengembangan	3.356.215.700	23.500.000	-	-	3.379.715.700	0,31%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.336.811.150	101.199.000	-	-	12.438.010.150	1,13%
Inspektori Daerah	12.336.811.150	101.199.000	-	-	12.438.010.150	1,13%
UNSUR KEWILAYAHAN	11.384.333.440	1.514.729.384	-	-	12.899.062.824	1,18%
Kecamatan	11.384.333.440	1.514.729.384	-	-	12.899.062.824	1,18%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.645.124.619	53.025.100	-	-	30.698.149.719	2,80%
Kesejahteraan Bangsa Dan Politik	30.645.124.619	53.025.100	-	-	30.698.149.719	2,80%
TOTAL	763.207.638.163	159.988.203.074	2.150.745.082	172.237.804.100	1.097.584.390.419	100,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

- 1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
Dasar	
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp525.943.048.617,00 atau setara dengan 47,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:	
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 atau setara dengan 27,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 atau setara dengan 14,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.506.045.634,00 atau setara dengan 4,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp244.302.246,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp17.080.942.750,00 atau setara dengan 1,56% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp4.600.224.900,00 atau setara dengan 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp79.062.442.035,00 atau setara dengan 7,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:	
1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp545.998.700,00 atau setara dengan 0,05% dari total	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp4.173.171.250,00 atau setara dengan 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp2.902.510.200,00 atau setara dengan 0,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp494.308.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp16.507.236.312,00 atau setara dengan 1,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.464.336.250,00 atau setara dengan 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.860.123.930,00 atau setara dengan 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.099.401.500,00 atau setara dengan 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebesar Rp3.584.597.200,00 atau setara dengan 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.765.570.295,00 atau setara dengan 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp4.925.979.620,00 atau setara dengan 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sebesar Rp3.473.454.300,00 atau setara dengan 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.091.982.895,00 atau setara dengan 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp123.001.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp253.110.250,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp1.502.604.100,00 atau setara dengan 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar Rp14.089.230.733,00 atau setara dengan 1,28% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp205.825.500,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.	
c. Urusan Pemerintahan Pilihan	
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp102.365.894.740,00 atau setara dengan 9,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:	
1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.042.740.250,00 atau setara dengan 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00	
2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp4.885.793.870,00 atau setara dengan 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp16.200.311.970,00 atau setara dengan 1,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar Rp71.625.196.450,00 atau setara dengan 6,53% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar Rp5.611.852.200,00 atau setara dengan 0,51% dari total belanja daerah sebesar sebesar sebesar sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp109.730.028.251,00 atau setara dengan 10,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:	
1) Sekretariat Daerah sebesar Rp72.974.942.046 atau setara dengan 6,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
2) Sekretariat DPRD sebesar Rp36.755.086.205 atau setara dengan 3,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.	
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp224.447.754.083,00 atau setara dengan 20,45% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari:	
1) Perencanaan sebesar Rp6.454.414.070,00 atau setara dengan 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
2) Keuangan sebesar Rp210.622.190.113,00 atau setara dengan 19,19% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
3) Kepegawaian sebesar Rp3.991.434.200,00 atau setara dengan 0,36% dari total belanja daerah sebesar sebesar sebesar sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>4) Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.379.715.700,00 atau setara dengan 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;</p>	
<p>f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp12.438.010.150,00 atau setara dengan 1,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari Belanja Inspektorat Daerah sebesar Rp12.438.010.150,00 atau setara dengan 1,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.</p>	
<p>g. Unsur Kewilayahan Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan sebesar Rp12.899.062.824,00 atau setara dengan 1,18% dari total belanja daerah sebesar Rp12.899.062.824,00 terdiri dari lima belas (15) Kecamatan sebesar Rp12.899.062.824,00 atau setara dengan 1,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.</p>	
<p>h. Unsur Pemerintahan Umum Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp30.698.149.719,00 atau setara dengan 2,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.698.149.719,00 atau setara dengan 2,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.</p>	
<p>Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan belanja daerah:</p>	
<p>a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan</p>
<p>b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	Keuangan Daerah.
<p>2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:</p>	
<p>a. SPM Pendidikan</p>	
<p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp13.651.491.300,00 atau setara dengan 4,55 % dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p>	
<p>1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp7.174.137.500,00;</p>	
<p>2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp5.011.533.800,00;</p>	
<p>3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp1.465.820.000,00;</p>	
<p>harus untuk memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Pendidikan sesuai dengan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>
<p>b. SPM Kesehatan</p>	
<p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp5.559.831.401,00 atau setara dengan 3,59 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p>	
<p>1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp. 1.230.855.308,00;	
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp383.463.000,00;	
3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp111.324.000,00;	
4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp940.206.600,00;	
5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp269.275.000,00;	
6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp652.786.000,00;	
7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp375.223.000,00;	
8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp27.500.000,00;	
9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp507.184.953,00;	
10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp190.800.000,00;	
11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp95.943.540,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang terduga tuberkulosis) sebesar Rp775.270.000,00.</p> <p>Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p>
<p>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp889.203.657,00 atau setara dengan 1,80% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.506.045.634 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <p>1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota sebesar Rp549.988.900,00;</p> <p>2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp339.214.757,00.</p> <p>harus untuk memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
<p>d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp82.502.246,00;</p> <p>harus untuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>
<p>e. SPM Trantibumlinmas</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp4.989.712.150,00 atau setara dengan 29,21% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp17.080.942.750,00.</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp775.771.450,00; 2) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp308.579.600,00; 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp3.905.361.100,00. <p>harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Trantibumlinmas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>
<p>f. SPM Sosial</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp328.535.000,00 atau setara dengan 7,14 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp4.600.224.900,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:	
1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp199.095.000,00;	
2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten sebesar Rp129.440.000,00.	
harus untuk memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.	Terima kasih atas saran dan masukannya hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dalam menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Sosial sesuai dengan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:	
a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar Rp98.584.978.842,00 atau setara dengan 8,98% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.</p>	
<p>Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. 	
<p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui Program Prioritas (PP) sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp321.701.100,00; 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 2.453.603.300,00; 3) Program Promosi Penanaman modal dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp415.178.000,00; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00; 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 3.240.156.700,00; 7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dianggarkan sebesar Rp216.946.600,00; 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dianggarkan sebesar Rp379.161.200,00; 9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dianggarkan sebesar Rp4.335.545.870,00; 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp13.471.450.220,00; 11) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dianggarkan sebesar Rp818.498.200,00; 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p style="text-align: center;">1.</p> <p>12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dianggarkan sebesar Rp213.467.000,00;</p> <p>13) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dianggarkan sebesar Rp291.904.000,00;</p> <p>14) Program Penyuluhan Pertanian dianggarkan sebesar Rp1.314.451.300,00;</p> <p>b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp8.945.432.620,00 atau setara dengan 0,82% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.</p> <p>c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp119.308.870.669,00 atau setara dengan 10,87% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; 2. Reformasi sistem perlindungan sosial; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6. Mengentaskan kemiskinan; 7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui PP sebagai berikut:</p> <p>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp98.557.146.918,00;</p>	<p style="text-align: center;">2.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp47.779.259.269,00;	
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp199.224.000,00;	
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.199.621.650,00;	
5) Program Perlindungan Perempuan dianggarkan sebesar Rp120.154.500,00;	
6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang semula tidak dianggarkan dalam APBD pada APBD-P dianggarkan sebesar Rp65.047.700,00;	
7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.474.724.700,00;	
8) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp263.756.000,00;	
9) Program Penanganan Kerawanan Pangan dianggarkan sebesar Rp28.766.400,00;	
10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.573.120.630,00;	
11) Program Administrasi Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp408.612.100,00;	
12) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dianggarkan sebesar Rp1.654.500.000,00;	
13) Program Penunjang Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp4.479.017.695,00;	
14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dianggarkan sebesar Rp331.906.000,00;	
15) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dianggarkan sebesar Rp1.281.059.200,00;	
16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 3.330.970.570,00;	
17) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp1.420.589.000,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp27.648.277.823,00 atau setara dengan 2,52 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</p>	
<p>Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. 	
<p>Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui PP yaitu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dianggarkan sebesar Rp9.586.867.300,00; 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dianggarkan sebesar Rp1.011.884.840,00; 3) Program Pengembangan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp592.347.000,00; 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dianggarkan sebesar Rp3.805.881.150,00; 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
5) Program Pembinaan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp11.722.379.533,00;	
6) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dianggarkan sebesar Rp928.918.000,00.	
<p>e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan sebesar Rp37.441.979.978,00; atau setara dengan 3,41% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 ; yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p>	
Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:	
1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;	
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;	
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;	
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;	
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.	
Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui PP sebagai berikut:	
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 6.962.543.539,00;	
2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dianggarkan sebesar Rp549.988.900,00;	
3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dianggarkan sebesar Rp522.695.000,00;	
4) Program penataan bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp4.168.230.556,00;	
5) Program penyelenggaraan penataan ruang dianggarkan sebesar Rp326.777.000,00;	
6) Program penyelesaian sengketa tanah garapan dianggarkan sebesar Rp101.430.000,00;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
7) Program Pengelolaan Tanah Kosong dianggarkan sebesar Rp392.878.000,00;	
8) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dianggarkan sebesar Rp824.576.850,00;	
<p>f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp19.732.481.194,00; atau setara dengan 1,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.</p> <p>Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap <i>baseline</i>. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari PP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dianggarkan sebesar Rp9.265.682.322,00; 2) Program Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp1.201.116.550,00; 	
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Rp28.581.108.279 atau setara dengan 2,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.</p>	
<p>Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal; 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	
<p>Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui PP sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dianggarkan sebesar 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

- Rp23.039.839.829,00;
- 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dianggarkan sebesar Rp3.805.881.150,00;
 - 3) Program Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp1.294.114.600,00;
 - 4) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp441.272.700,00;
- Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	98.584.978.842	8,98%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	8.945.432.620	0,82%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	119.308.870.669	10,87%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	27.648.277.823	2,52%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	37.441.979.978	3,41%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	19.732.481.194	1,80%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	28.581.108.279	2,60%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	340.243.129.405	31,00%
	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419	100,00%

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%; b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta c. Meningkatkan kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%. <p>Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (<i>rebound</i>) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi <i>COVID-19</i> serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Barat sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT																																
1.	2.																																
<p>c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i>;</p> <p>d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan</p> <p>e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>																																	
<p>4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami</p>																																
<p style="text-align: center;">Tabel. 7</p> <p>Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2023</p>																																	
<table border="1" data-bbox="279 1052 1255 1481"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Prioritas Daerah Provinsi</th> <th>Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)</th> <th>Rasio terhadap Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;</td> <td>117.675.795.060</td> <td>10,72%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;</td> <td>484.556.779.565</td> <td>44,15%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembangunan Infrastruktur;</td> <td>53.829.253.080</td> <td>4,90%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Reformasi Birokrasi;</td> <td>376.119.264.433</td> <td>34,27%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan</td> <td>41.092.389.319</td> <td>3,74%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.</td> <td>24.310.908.962</td> <td>2,21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>1.097.584.390.419</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas Daerah Provinsi	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;	117.675.795.060	10,72%	2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;	484.556.779.565	44,15%	3	Pembangunan Infrastruktur;	53.829.253.080	4,90%	4	Reformasi Birokrasi;	376.119.264.433	34,27%	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan	41.092.389.319	3,74%	6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.	24.310.908.962	2,21%		TOTAL	1.097.584.390.419	100,00%	
No.	Prioritas Daerah Provinsi	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)																														
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;	117.675.795.060	10,72%																														
2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;	484.556.779.565	44,15%																														
3	Pembangunan Infrastruktur;	53.829.253.080	4,90%																														
4	Reformasi Birokrasi;	376.119.264.433	34,27%																														
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan	41.092.389.319	3,74%																														
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.	24.310.908.962	2,21%																														
	TOTAL	1.097.584.390.419	100,00%																														

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

1.

PENJELASAN TINDAK LANJUT

2.

- 5) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel 8

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	117.675.795.060	10,72%
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	484.556.779.565	44,15%
3	Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	78.140.162.042	7,12%
4	Reformasi Birokrasi	376.119.264.433	34,27%
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	41.092.389.319	3,74%
	TOTAL	1.097.584.390.419	100,00%

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Terima kasih atas perhatiannya

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 301.304.513.300,00; atau 27,45 % dari total belanja daerah sebesar Rp 1.097.584.390.419,00; sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	299.801.909.200
	1) Belanja Operasi:	279.123.653.130
	a. belanja pegawai;	233.266.542.700
	b. belanja barang dan jasa;	38.363.435.930
	c. belanja hibah;	7.493.674.500
	d. belanja bantuan sosial.	0
	2) Belanja Modal;	20.678.256.070
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.502.604.100
	1) Belanja Operasi:	1.355.024.100
	a. belanja pegawai;	0
	b. belanja barang dan jasa;	672.524.100
	c. belanja hibah;	682.500.000
	d. belanja bantuan sosial.	0
	2) Belanja Modal;	147.580.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	14.089.230.733
	1) Belanja Operasi:	3.218.398.600
	a. belanja pegawai;	1.983.009.900
b. belanja barang dan jasa;	1.135.388.700	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024
	c. belanja hibah;	100.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	0
2)	Belanja Modal;	10.870.832.133
d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	
1)	Belanja Operasi:	6.091.982.895
	a. belanja pegawai;	3.920.145.795
	b. belanja barang dan jasa;	1.146.837.100
	c. belanja hibah;	1.025.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-
2)	Belanja Modal;	-
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	
1)	Belanja Transfer:	0
	Belanja bantuan keuangan	
2)	Sub Kegiatan pada OPD	
	dst	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	301.304.513,300
3.	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,45%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang

Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat</p> <p>Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan sebesar Rp299.801.909.200,00 atau setara dengan 99,50% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp233.910.040.000,00 atau setara dengan 77,63% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp301.304.513.300,00; 2) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 65.805.301.200,00 atau 21,84% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp301.304.513.300,00; <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p>	
<p>b. Alokasi Anggaran Kesehatan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp154.709.623.887,00 atau setara dengan 14,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:</p> <p>A. Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Peningkatan Pelayanan BLUD 9. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
10. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM da UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
11. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;	
12. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
13. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;	
14. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;	
15. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
16. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
17. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;	
18. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;	
19. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
20. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
21. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
B. RSUD Alimuddin Umar	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;	
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	
8. Peningkatan Pelayanan BLUD;	
9. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;	
10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;	
12. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	
13. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.	
yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:	
a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;	
b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting:	
(1) peningkatan skrining anemia remaja putri;	
(2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;	
(3) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care);	
(4) konsumsi TTD ibu hamil;	
(5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);	
(6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;	
(7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>(8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);</p> <p>(9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight faltering, wasting, dan stunting);</p> <p>(10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;</p> <p>(11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;</p> <p>c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:</p> <p>(1) Tuberkulosis (TBC);</p> <p>(2) Human Immunodeficiency Virus (HIV);</p> <p>(3) Malaria;</p> <p>(4) Penyakit menular lainnya;</p> <p>d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:</p> <p>(1) Diabetes Melitus;</p> <p>(2) Hipertensi;</p> <p>(3) Penyakit tidak menular lainnya;</p> <p>e) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:</p> <p>(1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);</p> <p>(2) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;</p> <p>(3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);</p> <p>(4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, <i>stroke</i>, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);</p> <p>(5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);</p> <p>f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; (2) perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu; (3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) (4) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; <p>Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita Rp13.313.360.000,00 atau setara dengan 12% dari total anggaran kesehatan sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Terima kasih, hal ini akan menjadi perhatian dan pedoman kami

c. Anggaran Insfrastruktur

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.097.584.390.419
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	1.845.021.100
	b. bantuan keuangan	170.392.783.000
	Jumlah (a+b)	172.237.804.100
3.	Selisih (1-2)	925.346.586.319
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	370.138.634.528

1.

2.

Tabel 10.1

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2024
1.	a) Belanja Modal	
	1) Tanah	
	2) Peralatan dan Mesin	19.231.891.020
	3) Gedung dan Bangunan	97.939.801.145
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	38.495.758.266
	5) Aset tetap lainnya	4.061.421.643
	6) Aset lainnya	259.331.000
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	
	c) Belanja pemeliharaan	6.586.244.300
2.	a) Belanja Hibah	38.965.943.079
	b) Belanja Bantuan Sosial	45.000.000
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	205.585.390.453
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	32%

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp925.346.586.319,00 sesuai ketentuan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.</p>	
<p>d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.</p> <p>Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diluar belanja pegawai sebesar Rp5.188.316.050,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp7.249.694.100,00 atau setara dengan 0,66 % dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada OPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp5.188.316.050,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah: <p>Antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.654.009.850,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp3.013.646.500,00; 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp770.353.800,00 <p>Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 sesuai ketentuan butir E.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan pengawasan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) <i>Reviu</i> dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) <i>Reviu</i> Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi <i>Probitiy Audit</i>, <i>Reviu</i> Laporan Kinerja, <i>Reviu</i> LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.</p>	
<p>2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.</p>	
<p>3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.</p>	
<p>e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.991.434.200,00 atau setara dengan 0,36% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan sebagai berikut:</p>	
<p>1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp1.702.315.200,00 atau setara dengan 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; dan</p>	
<p>2) Alokasi belanja pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.289.119.000,00 atau setara dengan 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00:</p>	
<p>antara lain tercantum pada:</p>	
<p>1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.697.319.600,00;</p>	
<p>2) Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.294.114.600,00;</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.</p>
<p>f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa</p> <p>Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp1.611.167.600,00 atau setara dengan 10,00% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp16.111.675.421,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa</p> <p>Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp233.853.500,00 atau setara dengan 10,00% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.338.534.672,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf C.3.d.2).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp55.844.980.000,00 atau setara dengan 10,00% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir C.3.d.2).6).(9). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya memenuhi alokasi anggaran untuk memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir C.3.d.2).6).(9). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan sebesar Rp9.671.246.298,00 atau setara dengan 37,5% dari total</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus berupaya memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>pendapatan pajak rokok sebesar Rp25.789.990.128,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir C.2.a.1).p).(5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir C.2.a.1).p).(5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p>	
<p>a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp227.799.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;</p>	
<p>2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i> dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;</p>	
<p>3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;</p> <p>4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;</p> <p>5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, <i>Antropometri</i>, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;</p> <p>6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
g) kesehatan;	
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;	
i) kelestarian lingkungan hidup; dan	
j) perencanaan sehat.	
7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lampung Barat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat serta kegiatan lainnya.	
9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3,652,087,650,00 atau setara dengan 0,33 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Barat.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial tidak dianggarkan untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dimasa yang akan datang.</p>
<p>e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp389.244.825.522,00 atau setara dengan 95,29% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp408.476.716.542,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	
<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipta Kerja dan sesuai ketentuan butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya.</p>
<p>f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 3) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa; 5) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; 6) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD. <p>dianggarkan sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia</p> <p>Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>3) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>4) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;</p> <p>5) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.</p> <p>dianggarkan sebagaimana maksud butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum</p> <p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp265.825.000,00, dianggarkan sesuai ketentuan butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, alokasi anggaran untuk bantuan hukum telah dianggarkan sesuai ketentuan butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>i Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp100.000.000,00 sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya.</p>
<p>j Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:</p> <p>1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.609.400.000,00;</p> <p>2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp248.488.513.468,00;</p> <p>3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.203.527.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp380.000.000,00;</p> <p>5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp61.401.000,00.</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s.8). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, alokasi anggaran BLUD telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s.8). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>k. Penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp28.472.031.230,00; 2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp3.342.360.000,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.722.658.260,00; 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp3.933.800.510,00; <p>dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>3. Belanja Operasi</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp763.207.638.163,00 atau setara dengan 69,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
a. Belanja Pegawai	
Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp471.987.251.991,00	
Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:	
A Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
<p>Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp331.282.665.27100 atau setara dengan 30,18% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan <i>acress</i> yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, pada APBD TA 2024 telah dianggarkan <i>acress</i> untuk gaji dan tunjangan ASN</p>
B Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:	
<p>(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp12.114.460.200,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

1.

2024.
Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.13 sebagai berikut:

Tabel.13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	250.437.368.902
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.639.998.501
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.469.380.000
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.661.311.700
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.227.473.102
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.608.323.600
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	66.253.518.000
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	404.163.000
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.119.518.000
2	Jumlah Penerimaan	422.821.054.805
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	16.912.842.192,20
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	12.114.460.200
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	4.798.381.992

PENJELASAN TINDAK LANJUT

2.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp16.912.842.192,20 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp4.798.381.992,00.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp72.000.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel 14

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan	
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100
e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.000.000
2	Jumlah Penerimaan	2.155.267.700
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	86.210.708
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	72.000.000
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	-14.210.708

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp86.210.708,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp14.210.708,00.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sebesar Rp2.669.520,00, yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.278.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.184.100
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	857.500
2	Jumlah Penerimaan	70.319.600
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	2.812.784
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	2.669.520
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	-143.264

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp2.812.784,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp143.264,00.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, dapat kami sampaikan bahwa Bupati Lampung Barat merupakan Penjabat Bupati yang berasal dari ASN.</p>
<p>b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:</p> <p>(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:</p> <p>(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp602.251.246,00;</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.806.753.834,00;</p> <p>Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengalokasikan:</p> <p>(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp602.049.685,36 atau setara dengan 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp250.437.368.902,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.201.560,64;</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.803.149.056,09 atau setara dengan 0,72% dari gaji pokok sebesar Rp250.437.368.902,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp3.604.777,91.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p> <p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:</p> <p>(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp124.000.000,00;</p> <p>(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD sebesar Rp301.656.000,00. dianggarkan kepada:</p> <p>(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat; agar dianggarkan sesuai ketentuan butir 3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>2. Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, yang diuraikan pada:</p> <p>a) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dianggarkan;</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>b) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK tidak dianggarkan;</p> <p>Agar dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>3. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:</p>	
<p>a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp14.811.233.300,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, alokasi belanja gaji dan tunjangan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional</p>
<p>b) Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:</p>	
<p>(1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp782.040.000,00; sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:</p>	

1.

2.

Tabel 16
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2024	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	32	1.575.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	35	55.860.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)		782.040.000
Alokasi uang representasi pada APBD			782.040.000
Selisih lebih bayar			0

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.133.958.000,00; alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau setara dengan 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp124.784.100,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00; telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

Terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih atas perhatiannya.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	35	6.300.000
	Jumlah Pagu		2.646.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD		2.646.000.000
3	Selisih		0

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp661.500.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Terima kasih atas perhatiannya.

1.

2.

Tabel 18
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2024 (1)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	35	6.300.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		661.500.000
	Selish		0

Berdasarkan tabel diatas, telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp3.916.800.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.761.600.000,00, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

Terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih atas perhatiannya, Belanja Tunjangan Perumahan DPRD telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

Terima kasih atas perhatiannya, belanja Tunjangan Transportasi DPRD telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

1.

2.

18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00; telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
2	Wakil Ketua DPRD	1.5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	110.880.000
	Alokasi uang representasi pada APBD	110.880.000
	Selisih	0

Terima kasih atas saran dan masukannya, Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p data-bbox="667 105 700 131">1.</p> <p data-bbox="269 142 1265 467">dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p data-bbox="269 505 1265 906">Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.</p>	<p data-bbox="1821 82 1854 108">2.</p> <p data-bbox="1330 477 2394 565">Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p data-bbox="169 933 1216 976">4. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p data-bbox="219 1003 1265 1263">Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau setara dengan 0,59% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.111.675.421,00 telah memenuhi alokasi anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.</p> <p data-bbox="219 1317 1265 1474">Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	<p data-bbox="1330 980 2394 1068">Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>5. Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp52.608.323.600,00 atau setara dengan 4,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:</p> <p>a) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp52.608.323.600,00;</p> <p>b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp16.800.000,00; dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp71.079.811.000,00 atau setara dengan 6,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp66.253.518.000,00;</p> <p>b) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.119.518.000,00;</p> <p>c) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.354.212.000,00</p> <p>d) Belanja Honorarium sebesar Rp948.400.000,00; yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp944.790.000,00;	
(2) Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.360.000,00	
(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.250.000,00;	
dapat dianggarkan sesuai ketentuan :	
<p>a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.</p>	
b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Regional Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.</p>	
<p>b. Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp248.488.513.468,00 atau setara dengan 22,64% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:</p> <p>1) Belanja Barang sebesar Rp45.355.456.898,00 atau setara dengan 4,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp45.260.161.118,00 atau setara dengan 4,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:</p> <p>(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.814.668.944,00;</p> <p>(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp4.748.061.300,00;</p> <p>(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp2.094.085.000,00;</p> <p>(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp166.220.000,00;</p> <p>(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp568.491.095,00;</p> <p>(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp249.237.000,00;</p> <p>(7) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp1.459.944.414,00;</p> <p>(8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp6.728.395.000,00;</p> <p>(9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp1.522.137.500,00;</p> <p>(10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp2.599.410.000,00;</p> <p>(11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.017.624.000,00;</p> <p>(12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp48.575.000,00;</p> <p>(13) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp185.000.000,00; dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.711.394.107,00;</p> <p>b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.841.933.311,00;</p> <p>Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.628.072.500,00 atau setara dengan 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	
<p>a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.570.260.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	
<p>(1) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp733.000.000,00;</p>	
<p>(2) Belanja Beasiswa sebesar Rp837.260.000,00;</p>	
<p>b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.057.812.500,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian Objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp4.057.812.500,00;</p>	
<p>Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RPD, dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukkannya, hal ini akan menjadi pedoman kami</p>
<p>Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>2) Belanja Jasa sebesar Rp78.736.157.992,00 atau setara dengan 7,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:</p>	
<p>a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.002.638.046,00 atau setara dengan 4,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.</p>	
<p>Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	
<p>(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.088.350.000,00;</p>	
<p>(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp645.800.046,00;</p>	
<p>(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp643.950.000,00;</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
(4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebesar Rp30.960.000,00;	
(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.877.345.000,00;	
(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2.522.400.000,00;	
(7) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp409.960.000,00;	
(8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp76.200.000,00;	
(9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp193.600.000,00;	
(10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.873.600.000,00;	
(11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp1.605.620.000,00;	
(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp1.237.260.000,00;	
(13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp641.100.000,00;	
(14) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp446.400.000,00;	
(15) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebesar Rp129.600.000,00;	
(16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp5.030.900.000,00;	
(17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.478.611.000,00.	
<p>Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp15.798.605.756,00 atau setara dengan 1,44% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>(1) Dalam rangka mewujudkan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp2.257.725.080,00;</p>	
<p>(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 sebesar Rp215.006.400,00; dianggarkan bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Daerahnya dengan skema ganda, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>	
<p>(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.432.871.200,00;</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp297.842.892,00;</p> <p>(c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp235.505.784,00;</p> <p>dianggarkan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(d) dan butir C.3.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.901.953.740,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp 1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:</p> <p>(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.066.328.740,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp3.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp175.725.000,00;</p> <p>(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.753.575.000,00 atau setara dengan 0,16% dari total</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp143.750.000,00;</p> <p>(4) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp1.049.200.000,00;</p> <p>(5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp295.000.000,00 atau setara dengan 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp240.500.000,00.</p>	
<p>dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta sesuai ketentuan butir C.3.b.8).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukkannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>
<p>d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.502.664.450,00 atau setara dengan 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebesar Rp773.664.000,00;</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp150.000.000,00;</p> <p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebesar Rp165.000.000,00;</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebesar Rp133.500.000,00;</p> <p>(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung sebesar Rp1.280.500.450,00.</p> <p>(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.497.930.000,00 atau setara dengan 0,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp15.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebesar Rp670.000.000,00;</p> <p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp171.930.000,00;</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen sebesar Rp200.000.000,00;</p> <p>(e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp1.441.000.000,00.</p> <p>dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.983.791.000,00 atau setara dengan 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp2.754.401.000,00;</p> <p>(2) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp47.500.000,00;</p> <p>(3) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp181.890.000,00.</p> <p>Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp4.273.527.600,00; dapat dianggarkan dengan berpedoman</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukkannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p data-bbox="667 110 705 134">1.</p> <p data-bbox="376 142 1265 654">pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p data-bbox="376 678 1265 971">Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.</p> <p data-bbox="376 995 1265 1433">Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, <i>workshop</i>, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p data-bbox="1826 86 1864 110">2.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.586.244.300,00 atau setara dengan 0,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:</p> <p>a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp228.110.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;</p> <p>b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.078.696.300,00 atau setara dengan 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp101.410.000,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp3.495.098.300,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp751.525.000,00;</p> <p>(4) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Alat Kalibrasi sebesar Rp71.713.000,00;</p> <p>(5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp219.540.000,00;</p> <p>(6) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp34.500.000,00;</p> <p>c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp670.474.000,00 atau setara dengan 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp461.779.250,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp128.694.750,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
Pendidikan sebesar Rp30.000.000,00;	
(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp50.000.000,00;	
(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.794.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp502.450.000,00;	
d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp600.794.000,00 atau setara dengan 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain tercantum pada:	
(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp98.344.000,00;	
(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp502.450.000,00;	
e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.170.000,00 atau setara dengan 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebesar Rp8.170.000,00.	
Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp49.799.781.130,00 atau setara dengan 4,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00. Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:</p> <p>(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp25.940.358.500,00;</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp8.182.101.000,00;</p> <p>(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp14.438.732.630,00;</p> <p>(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.238.589.000,00.</p>	
<p>harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir C.3.a.2).(4).(a).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat <i>urgent</i> dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat , antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat <i>urgent</i> sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.</p> <p>Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:</p> <p>a) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.940.758.000,00 atau setara dengan 5,40% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp72.974.942.046,00;</p> <p>b) Sekretariat DPRD sebesar Rp8.666.642.000,00 atau setara dengan 23,58% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp36.755.086.205,00;</p> <p>Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.570.260.000,00 atau setara dengan 0,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.570.260.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp733.000.000,00 dapat dianggarkan dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	
<p>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.3.a.2).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat telah berpedoman pada ketentuan butir C.3.a.2).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>
<p>c. Belanja Hibah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.222.159.500,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar sebesar Rp6.222.159.500,00; 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.068.655.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.068.655.000,00; 	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp50.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp50.000.000,00;</p> <p>4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp155.000.000,00 yang tercantum pada;</p> <p>a. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp135.000.000,00;</p> <p>b. Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp20.000.000,00;</p>	
<p>dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, hal ini akan menjadi perhatian dan pedoman kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dari total belanja dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.</p>	
<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp671.254.272,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>d. Bantuan Sosial sebesar Rp45.000.000,00 atau setara dengan 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebesar Rp45.000.000,00.</p>	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>3. Belanja Modal</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp159.988.203.074,00 atau setara dengan 14,58% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi <i>asset</i>, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan butir C.3.b.2) dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:</p> <p>a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.</p> <p>b) Standar barang, standar kebutuhanan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:</p> <p>a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.231.891.020,00 yang diuraikan ke dalam objek:</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, alokasi belanja modal telah sesuai dengan butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp113.697.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.	
2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp5.168.132.000,00 atau setara dengan 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek:	
(1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp 5.018.132.000,00;	
(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp150.000.000,00;	
3) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp366.452.500,00 atau setara dengan 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00;	
4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.613.585.860,00 atau setara dengan 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:	
a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp483.565.000,00;	
b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.053.220.860,00;	
c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp76.800.000,00.	
5) Belanja Modal Alat <i>Studio</i> , Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp132.686.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:	
a) Belanja Modal Alat <i>Studio</i> sebesar Rp110.536.000,00;	
b) Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp18.400.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi <i>Telephone</i> .	
6) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.655.958.200,00 atau setara dengan 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:	
a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp1.179.087.000,00;	
b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp 476.871.200,00.	
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.939.801.145,00 atau setara dengan 8,92% dari total belanja daerah sebesar	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp96.688.601.145,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obiek:</p> <p>(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp2.791.889.545,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp10.772.016.000,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp940.750.000,00;</p> <p>(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp2.312.615.600,00.</p>	
<p>c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp38.495.758.266,00 atau setara dengan 3,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek:</p>	
<p>1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp34.511.544.966,00 atau setara dengan 3,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan pada rincian objek:</p>	
<p>a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp32.092.344.966,00;</p> <p>b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp2.419.200.000,00;</p>	
<p>2) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp1.470.000.000,00 atau setara dengan 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.</p>	
<p>d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.061.421.643,00 atau setara dengan 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan.</p>	
<p>Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>Terima kasih atas sarannya, hal ini akan menjadi perhatian dan pedoman kami</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.917.350.000,00;</p> <p>b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp229.175.000,00. Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>a) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp259.331.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.930.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.930.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp197.930.000,00. dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat , sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukkannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.917.350.000,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp1.917.350.000,00 yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp69.498.000,00; 2) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebesar Rp 1.847.852.000,00. <p>d. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp229.175.000,00 atau setara dengan 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp5.100.000,00 yang tercantum pada Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Umum sebesar Rp5.100.000,00; 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp191.700.000,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp2.475.000,00; b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah sebesar Rp168.300.000,00; c) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp203.925.000,00; <p>dianggarkan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukkannya, hal ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>4. Belanja Tidak Terduga</p> <p>Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai butir C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.150.745.082,00 atau setara dengan 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, belanja tidak terduga dialokasikan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.</p>
<p>5. Belanja Transfer</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp172.237.804.100,00 atau setara dengan 15,69% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan pada:</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.845.021.100,00 atau setara dengan 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:</p> <p>1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.611.167.000,00 atau setara dengan 10,00% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp16.111.675.421,00.</p> <p>telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh</p>	<p>Terima kasih atas perhatiannya, belanja bagi hasil pajak daerah telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p style="text-align: center;">1.</p> <p>persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp233.853.500,00 atau setara dengan 10,00% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.338.534.672,00; telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>3) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp170.392.783.000,00 atau setara dengan 15,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp170.392.783.000,00 atau setara dengan 15,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00. dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas</p>	<p style="text-align: center;">2.</p> <p>C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Terima kasih atas perhatiannya, belanja bagi hasil retribusi daerah telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan butir C.3.d.b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah sebesar Rp4.996.609.380,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Pembiayaan Daerah

Uraian	F-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target F-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target F-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Semester I F-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3/2	5	6=5-2	7=6/2	8=5/3
PEMBAYAAH DAERAH	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.258.068.190	52%	52%
PEKERJAAN PEMBAYAAH	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.258.068.190	52%	52%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.174.340.190	48.174.340.190	100%	24.915.272.000	- 23.258.068.190	52%	52%

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Penerimaan Daerah	0	0	0	-	0	0
PENGELUARAN PEMBAYAN	19.918.662.620	8.919.076.170	45%	19.918.662.620	-	100%
Penerimaan Modal Daerah	2.000.000.000	0	0%	2.000.000.000	-	100%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620	8.919.076.170,00	50%	17.918.662.620	-	100%

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp24.915.272.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp24.915.272.000,00 atau setara dengan 2,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00.
4. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp19.918.662.620,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp17.918.662.620,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir C.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG

PENJELASAN TINDAK LANJUT

1.

2.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SERTA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD 2024	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	289	1.479.466.472.800	289	1.239.688.874.546	266	1.097.584.390.419
2.	Jumlah Kegiatan	707		697		638	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	2383		2294		2142	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih rendah daripada RKPD.</p> <p>Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA serta PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p data-bbox="667 105 700 131">1.</p> <p data-bbox="219 142 1265 397">yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="219 430 1265 685">Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.</p>	<p data-bbox="1821 82 1854 108">2.</p>
<p data-bbox="127 755 1265 933">V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p data-bbox="169 966 1265 1079">Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="169 1096 1265 1388" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="169 1096 1265 1242">1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp1.398.277.800.573,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.097.584.390.419,00; <li data-bbox="169 1242 1265 1388">2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sejumlah 293 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sejumlah 266 program. <p data-bbox="219 1421 1265 1485">Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan:</p>	<p data-bbox="1333 1209 2397 1291">Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.</p>	
<p>2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.</p>	
<p>VI. REKOMENDASI</p>	
<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024:</p>	
<p>A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi</p>	<p>Terima Kasih Atas Sarannya, hal ini tetap menjadi pedoman kami</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; <p>sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>D. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.19.1/435/SJ dan Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, alokasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.</p>
<p>E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman kepada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>F. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan. 	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT								
1.	2.								
<p>G. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 masih terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>								
<p>H. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menganggarkan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>								
<p>I. Pemerintah Lampung Barat agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.358.204.968,00 (per November 2023) serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2024 sebesar Rp27.605.696.078,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="0" data-bbox="219 1136 1270 1315"> <tr> <td>1) Iuran JKN</td> <td>Rp3.267.772.200,00</td> </tr> <tr> <td>2) Iuran Jamkes PBP</td> <td>Rp78.960.000,00</td> </tr> <tr> <td>3) Iuran Jamkes Kades & Perangkat Desa</td> <td>Rp11.472.768,00</td> </tr> <tr> <td>4) Proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023</td> <td>Rp 27.605.696.078,00</td> </tr> </table>	1) Iuran JKN	Rp3.267.772.200,00	2) Iuran Jamkes PBP	Rp78.960.000,00	3) Iuran Jamkes Kades & Perangkat Desa	Rp11.472.768,00	4) Proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023	Rp 27.605.696.078,00	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan.</p>
1) Iuran JKN	Rp3.267.772.200,00								
2) Iuran Jamkes PBP	Rp78.960.000,00								
3) Iuran Jamkes Kades & Perangkat Desa	Rp11.472.768,00								
4) Proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023	Rp 27.605.696.078,00								
<p>J. Penyampaian rancangan KUA PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP tanggal 14 Juli 2023, sedangkan Laporan Hasil Review (LHR) terhadap dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD diterbitkan tanggal 21 Juli 2023. Untuk itu pada penyusunan APBD berikutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melakukan</p>	<p>Dapat kami sampaikan bahwa Review RKA OPD dilakukan pada tahapan penyusunan APBD</p>								

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>review terhadap dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD sebelum dilakukan Penyampaian rancangan KUA PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan butir D.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>K. Pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dianggarkan pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan butir C.2.a.3)n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>Sedangkan penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan ketentuan butir C.2.a.1)n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>L. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp471.978.251.991,00 atau setara dengan 36,83% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas saran dan masukannya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami dimasa yang akan datang.</p>
<p>M. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja di 44 OPD pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan dokumen PPAS. Penambahan atau pengurangan pagu dapat dilakukan apabila terdapat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak memenuhi keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran OPD dimaksud dikembalikan pada Pagu KUA, PPAS dan selisih</p>	<p>Dapat kami sampaikan bahwa pagu pada PPAS merupakan pagu yang bersifat indikatif, ketidaksesuaian pagu dana antara Rancangan APBD Tahun 2024 dan dokumen KUA/PPAS Tahun 2024 dikarenakan terdapat tahapan pembahasan antara Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memungkinkan hasilnya terdapat perubahan pagu dana, baik dalam rangka penataan gaji, pemenuhan mandatory atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan kondisi terkini.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>lebih anggaran dialihkan untuk mendanai mandatory spending yang belum terpenuhi serta Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.</p>	
<p>N. Terdapat selisih kurang Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp4.798.381.991,00, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>O. Terdapat selisih kurang Iuran Jaminan Kesehatan DPRD sebesar Rp14.210.708,00, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan besaran alokasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>Tahun Anggaran 2024.</p> <p>P. Terdapat kesalahan penganggaran rekening Rincian Objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan yang dianggarkan pada Objek Lain-lain PAD yang sah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menyesuaikan Rincian Objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dianggarkan pada Objek Retribusi Jasa Umum dengan Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan butir C.2.a.1)a)(2)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pasal 27 ayat (1)a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Q. Nomenklatur jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar disesuaikan dengan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, maka pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>R. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p> <p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>
<p>I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.</p> <p>1. Diktum Mengingat, angka 18 Lembar pengundangan agar diperbaiki.</p> <p>2. Batang Tubuh.</p> <p>a. Pasal 8 ayat (6), frasa huruf f diubah menjadi frasa huruf e.</p> <p>b. Pasal 16 angka 9 diubah menjadi:</p> <p>Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;</p> <p>3. Lampiran :</p> <p>a. Lampiran I, setelah judul lampiran tambahkan frasa "TAHUN ANGGARAN 2024".</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
<p style="text-align: center;">1.</p> <p>Lampiran selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>b. Lampiran II, kolom surplus/(defisit) dan kolom persentase (%) pada tabel lampiran dihapus.</p> <p>c. Lampiran III.</p> <p>1) Frasa PENDAPATAN DAERAH pada kolom atas tabel lampiran dihapus.</p> <p>2) Pada kolom (dasar hukum) cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.</p> <p>d. Lampiran IV, sebelum judul lampiran tambahkan frasa KABUPATEN LAMPUNG BARAT.</p> <p>e. Lampiran IX, judul diubah menjadi : SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan amanat Pasal 16 Rancangan Peraturan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">2.</p>
<p>II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.</p> <p>1. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>2. Batang Tubuh.</p> <p>a. Pasal 5.</p> <p>1) ayat (8) diubah menjadi : Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>2) ayat (9), frasa ayat (1) huruf f diubah menjadi frasa ayat (1) huruf h.</p> <p>3) ayat (10), frasa ayat (1) huruf h diubah menjadi frasa ayat (1)</p> <p>b. Pasal 8.</p>	<p>Terima kasih atas rekomendasinya, hal ini akan menjadi pedoman dan perhatian kami.</p>

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
1) ayat (8), frasa ayat (1) huruf e diubah menjadi frasa ayat (1) huruf g.	
2) ayat (9), frasa ayat (1) huruf f diubah menjadi frasa ayat (1) huruf h.	
3. Lampiran :	
a. Lampiran I, judul diubah menjadi :	
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.	
b. Lampiran II, kolom nomor 4 (DASAR HUKUM) pada tabel lampiran diubah menjadi kolom PENJELASAN, dengan mencantumkan:	
1) dasar hukum pendapatan.	
2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.	
3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.	
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman APBD TA 2024.	
c. Lampiran IV, pada pojok kanan bawah akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.	

EVALUASI TIM PROPINSI LAMPUNG	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1.	2.
<p>S. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



disetujui di : Liwa
 Pada Tanggal :

2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



WAKIL KETUA I,

Hi. SUTIKNO.

WAKIL KETUA II,

ERWANSYAH, S.H.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN	URAIAN	Halaman
1	2	3
Lampiran I	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....	1 s.d 2
Lampiran II	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi....	1 s.d 9
Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	
PENDAPATAN DAERAH		
4	PENDAPATAN DAERAH.....	1
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	1
4 1 01	Pajak Daerah.....	1
4 1 02	Retribusi Daerah.....	1
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan....	1
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah.....	1
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	1
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	1
BELANJA DAERAH		
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	1
01 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN.....	1
01 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	1
01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN.....	17
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan.....	17
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0001	RSUD Alimuddin Umar.....	33
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Batu Brak.....	41
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Batu Ketulis.....	45
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Sekincau.....	49
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Air Hitam.....	52
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Fajar Bulan.....	56
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Buay Nyerupa.....	60
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Sumber Jaya.....	64
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Kebun Tebu.....	68
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Bandar Negeri Suoh.....	72
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Gedung Surian.....	75
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Liwa.....	79
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Lombok.....	83
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Kenali.....	87
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Pagar Dewa.....	91
01 02 1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Srimulyo.....	95
01 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	98
01 3 1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	98
01 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	109
01 4 1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	109
01 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	110
01 5 1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	110
01 5 1.05.0.00.0.00.25.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	116
01 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL.....	122
01 6 1.06.0.00.0.00.05.0000	Dinas Sosial.....	122
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	129
02 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA.....	129
02 7 2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	129

LAMPIRAN	URAIAN	Halaman
1	2	3
02 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135
02 8 2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135
02 8 2.08.2.14.0.00.11.0001	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	142
02 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN.....	143
02 9 2.09.0.00.0.00.07.0000	Dinas Ketahanan Pangan.....	143
02 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN.....	149
02 10 1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	149
02 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	150
02 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	150
02 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	156
02 12 2.12.0.00.0.00.09.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	156
02 12 2.12.0.00.0.00.09.0001	UPT Disdukcapil Way Tenong	164
02 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	164
02 13 2.13.0.00.0.00.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	164
02 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	172
02 14 2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	172
02 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	177
02 15 2.15.0.00.0.00.12.0000	Dinas Perhubungan	177
02 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	186
02 16 2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	186
02 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	192
02 17 2.17.3.30.0.00.14.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	192
02 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	198
02 18 2.18.0.00.0.00.15.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198
02 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	205
02 19 2.19.3.26.0.00.16.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	205
02 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK.....	211
02 20 2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	211
02 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	211
02 21 2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	211
02 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	212
02 22 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	212
02 22 1.01.2.22.0.00.01.0001	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila).....	214
02 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN...	216
02 23 2.23.2.24.0.00.17.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	216
02 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.....	221
02 24 2.23.2.24.0.00.17.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221
03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	222
03 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	222
03 25 3.25.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perikanan	222
03 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	231
03 26 2.19.3.26.0.00.16.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	231
03 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	232
03 27 3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	232
03 27 3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	239
03 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	248
03 30 2.17.3.30.0.00.14.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	248
03 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	249
03 31 2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	249

LAMPIRAN	URAIAN	Halaman
1	2	3
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	250
04 1	SEKRETARIAT DAERAH	250
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0001	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	250
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	251
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0003	BAGIAN HUKUM	252
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0004	BAGIAN PEREKONOMIAN	253
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0005	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	253
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0006	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	254
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0007	BAGIAN ORGANISASI	254
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0008	BAGIAN UMUM	255
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0009	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	260
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0010	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	262
04 1 4.01.2.07.0.00.28.0011	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	263
04 2	SEKRETARIAT DPRD	263
04 2 4.02.0.00.0.00.27.0000	Sekretariat DPRD	263
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	275
05 1	PERENCANAAN	275
05 1 5.01.0.00.0.00.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	275
05 2	KEUANGAN	286
05 2 5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	286
05 2 5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	293
05 3	KEPEGAWAIAN	304
05 3 5.03.5.04.0.00.23.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	304
05 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	311
05 5 5.05.0.00.0.00.24.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	311
06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	318
06 1	Inspektorat Daerah	318
06 1 6.01.0.00.0.00.29.0000	Inspektorat Daerah	318
07	UNSUR KEWILAYAHAN	325
07 1	KECAMATAN	325
07 1 7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sumber Jaya	325
07 1 7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Tugu Sari	332
07 1 7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Way Tenong	335
07 1 7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Fajar Bulan	342
07 1 7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Sekincau	343
07 1 7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Belalau	351
07 1 7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Batu Brak	357
07 1 7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Balik Bukit	364
07 1 7.01.0.00.0.00.35.0001	Kelurahan Pasar Liwa	371
07 1 7.01.0.00.0.00.35.0002	Kelurahan Way Mengaku	374
07 1 7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Sukau	376
07 1 7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Suoh	383
07 1 7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Gedung Surian	290
07 1 7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Kebun Tebu	396
07 1 7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Air Hitam	402
07 1 7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Pagar dewa	408
07 1 7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Batu Ketulis	413
07 1 7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	419
07 1 7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Lombok Seminung	424
08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	431
08 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	431
08 1 8.01.0.00.0.00.26.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	431

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.338.534.672,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.633.991.778,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.024.057.773.348,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	950.422.205.500,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00
	Jumlah Pendapatan	1.091.795.802.539,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	763.658.896.869,00
5.1.01	Belanja Pegawai	469.862.442.476,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.846.781.189,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.183.743.579,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	158.744.965.868,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.359.573.157,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.232.666.145,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.248.067.133,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.645.328.433,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	259.331.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.150.745.082,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4	BELANJA TRANSFER	172.237.804.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.845.021.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.392.783.000,00
	Jumlah Belanja	1.096.792.411.919,00
	Total Surplus/(Defisit)	-4.996.609.380,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.915.272.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.915.272.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00
	Pembiayaan Netto	4.996.609.380,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.791.522.418,00	458.120.467.290,00	67.044.314.827,00	0,00	0,00	525.164.782.117,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	325.800.000,00	278.265.630.300,00	20.561.512.400,00	0,00	0,00	298.827.142.700,00
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	325.800.000,00	278.265.630.300,00	20.561.512.400,00	0,00	0,00	298.827.142.700,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	38.132.522.418,00	146.377.608.087,00	8.415.515.800,00	0,00	0,00	154.793.123.887,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	74.589.274.219,00	4.012.415.800,00	0,00	0,00	78.601.690.019,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001	RSUD Alimuddin Umar	22.686.318.000,00	41.633.436.700,00	3.209.573.000,00	0,00	0,00	44.843.011.700,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Batu Brak	1.190.768.057,00	2.072.673.707,00	84.500.000,00	0,00	0,00	2.157.173.707,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Batu Ketulis	949.225.640,00	1.876.552.290,00	93.859.000,00	0,00	0,00	1.970.411.290,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Sekincau	869.552.408,00	1.903.815.058,00	66.587.000,00	0,00	0,00	1.970.402.058,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Air Hitam	504.099.153,00	1.532.102.803,00	30.600.000,00	0,00	0,00	1.562.702.803,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Fajar Bulan	1.071.050.867,00	1.984.812.517,00	128.801.000,00	0,00	0,00	2.113.613.517,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Buay Nyerupa	1.079.490.000,00	1.993.318.650,00	130.022.000,00	0,00	0,00	2.123.340.650,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Sumber Jaya	954.912.381,00	1.852.960.031,00	80.952.000,00	0,00	0,00	1.933.912.031,00
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Kebun Tebu	1.005.750.220,00	2.139.870.870,00	52.907.000,00	0,00	0,00	2.192.777.870,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	1.822.890.713,00	2.932.637.363,00	143.847.000,00	0,00	0,00	3.076.484.363,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Gedung Surian	649.215.000,00	1.522.216.650,00	55.828.000,00	0,00	0,00	1.578.044.650,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Liwa	1.749.032.887,00	2.629.001.537,00	106.978.000,00	0,00	0,00	2.735.979.537,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Lombok	445.812.330,00	1.445.889.980,00	11.020.000,00	0,00	0,00	1.456.909.980,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Kenali	1.179.771.960,00	2.026.608.610,00	87.621.000,00	0,00	0,00	2.114.229.610,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Pagar Dewa	841.720.157,00	2.057.819.807,00	43.297.000,00	0,00	0,00	2.101.116.807,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Srimulyo	1.129.912.645,00	2.184.615.295,00	76.708.000,00	0,00	0,00	2.261.323.295,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	333.200.000,00	11.960.421.207,00	37.648.624.427,00	0,00	0,00	49.609.045.634,00
1	03	1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	333.200.000,00	11.960.421.207,00	37.648.624.427,00	0,00	0,00	49.609.045.634,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	244.302.246,00	0,00	0,00	0,00	244.302.246,00
1	04	1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	244.302.246,00	0,00	0,00	0,00	244.302.246,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	16.705.120.550,00	375.822.200,00	0,00	0,00	17.080.942.750,00
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	13.097.471.200,00	105.870.000,00	0,00	0,00	13.203.341.200,00
1	05	1.05.0.00.0.00.25.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.607.649.350,00	289.952.200,00	0,00	0,00	3.877.601.550,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	4.567.384.900,00	42.840.000,00	0,00	0,00	4.610.224.900,00
1	06	1.06.0.00.0.00.05.0000	Dinas Sosial	0,00	4.567.384.900,00	42.840.000,00	0,00	0,00	4.610.224.900,00

OPD
KABAG HUKUM

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja						
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.251.211.172,00	64.402.271.145,00	15.201.973.883,00	0,00	0,00	79.604.245.028,00		
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12.600.000,00	2.145.109.900,00	51.312.500,00	0,00	0,00	2.196.422.400,00	
2	07	2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.600.000,00	2.145.109.900,00	51.312.500,00	0,00	0,00	2.196.422.400,00
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.143.051.250,00	30.120.000,00	0,00	0,00	4.173.171.250,00	
2	08	2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	3.854.694.150,00	30.120.000,00	0,00	0,00	3.884.814.150,00
2	08	2.08.2.14.0.00.11.0001	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	288.357.100,00	0,00	0,00	0,00	288.357.100,00
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	2.902.510.200,00	0,00	0,00	0,00	2.902.510.200,00	
2	09	2.09.0.00.0.00.07.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	2.902.510.200,00	0,00	0,00	0,00	2.902.510.200,00
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	494.308.000,00	0,00	0,00	0,00	494.308.000,00	
2	10	1.03.1.04.2.10.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	494.308.000,00	0,00	0,00	0,00	494.308.000,00
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	120.040.000,00	11.898.636.405,00	3.484.140.800,00	0,00	0,00	15.382.777.205,00	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	120.040.000,00	11.898.636.405,00	3.484.140.800,00	0,00	0,00	15.382.777.205,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.426.736.250,00	37.600.000,00	0,00	0,00	4.464.336.250,00	
2	12	2.12.0.00.0.00.09.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.390.520.850,00	37.600.000,00	0,00	0,00	4.428.120.850,00
2	12	2.12.0.00.0.00.09.0001	UPT Disdukcapil Way Tenong	0,00	36.215.400,00	0,00	0,00	0,00	36.215.400,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	4.745.890.530,00	16.000.000,00	0,00	0,00	4.761.890.530,00	
2	13	2.13.0.00.0.00.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	0,00	4.745.890.530,00	16.000.000,00	0,00	0,00	4.761.890.530,00



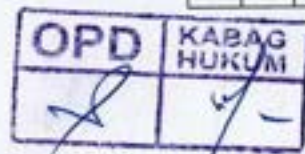
Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.099.401.500,00	0,00	0,00	0,00	5.099.401.500,00
2	14	2.08.2.14.0.00.11.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	5.099.401.500,00	0,00	0,00	0,00	5.099.401.500,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	191.184.000,00	3.134.222.200,00	450.375.000,00	0,00	0,00	3.584.597.200,00
2	15	2.15.0.00.0.00.12.0000	Dinas Perhubungan	191.184.000,00	3.134.222.200,00	450.375.000,00	0,00	0,00	3.584.597.200,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	6.725.650.295,00	39.920.000,00	0,00	0,00	6.765.570.295,00
2	16	2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	6.725.650.295,00	39.920.000,00	0,00	0,00	6.765.570.295,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	754.287.172,00	3.998.251.420,00	41.800.000,00	0,00	0,00	4.040.051.420,00
2	17	2.17.3.30.0.00.14.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	754.287.172,00	3.998.251.420,00	41.800.000,00	0,00	0,00	4.040.051.420,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	3.452.654.300,00	20.800.000,00	0,00	0,00	3.473.454.300,00
2	18	2.18.0.00.0.00.15.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.452.654.300,00	20.800.000,00	0,00	0,00	3.473.454.300,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	173.100.000,00	6.091.982.895,00	0,00	0,00	0,00	6.091.982.895,00
2	19	2.19.3.26.0.00.16.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	173.100.000,00	6.091.982.895,00	0,00	0,00	0,00	6.091.982.895,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	123.001.000,00	0,00	0,00	0,00	123.001.000,00
2	20	2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	123.001.000,00	0,00	0,00	0,00	123.001.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	241.616.800,00	11.493.450,00	0,00	0,00	253.110.250,00
2	21	2.16.2.20.2.21.13.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	241.616.800,00	11.493.450,00	0,00	0,00	253.110.250,00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	1.355.024.100,00	147.580.000,00	0,00	0,00	1.502.604.100,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.110.889.500,00	6.080.000,00	0,00	0,00	1.116.969.500,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0001	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)	0,00	244.134.600,00	141.500.000,00	0,00	0,00	385.634.600,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.218.398.600,00	10.870.832.133,00	0,00	0,00	14.089.230.733,00
2	23	2.23.2.24.0.00.17.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.218.398.600,00	10.870.832.133,00	0,00	0,00	14.089.230.733,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	205.825.500,00	0,00	0,00	0,00	205.825.500,00
2	24	2.23.2.24.0.00.17.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	205.825.500,00	0,00	0,00	0,00	205.825.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	128.253.500,00	27.680.045.140,00	74.043.671.100,00	0,00	0,00	101.723.916.240,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	68.400.000,00	4.012.669.450,00	30.070.800,00	0,00	0,00	4.042.740.250,00
3	25	3.25.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perikanan	68.400.000,00	4.012.669.450,00	30.070.800,00	0,00	0,00	4.042.740.250,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	2.504.858.370,00	1.588.957.000,00	0,00	0,00	4.093.815.370,00
3	26	2.19.3.26.0.00.16.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	2.504.858.370,00	1.588.957.000,00	0,00	0,00	4.093.815.370,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	59.853.500,00	15.964.891.670,00	235.420.300,00	0,00	0,00	16.200.311.970,00
3	27	3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	9.590.540.750,00	16.000.000,00	0,00	0,00	9.606.540.750,00
3	27	3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	59.853.500,00	6.374.350.920,00	219.420.300,00	0,00	0,00	6.593.771.220,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	2.757.061.450,00	69.018.135.000,00	0,00	0,00	71.775.196.450,00
3	30	2.17.3.30.0.00.14.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	2.757.061.450,00	69.018.135.000,00	0,00	0,00	71.775.196.450,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	2.440.564.200,00	3.171.288.000,00	0,00	0,00	5.611.852.200,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	31	2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	2.440.564.200,0 0	3.171.288.000,0 0	0,00	0,00	5.611.852.200,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	108.192.588.041 ,00	459.076.110,00	0,00	0,00	108.651.664.151,0 0
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	71.311.001.836, 00	355.576.110,00	0,00	0,00	71.666.577.946,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0001	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0,00	695.182.800,00	0,00	0,00	0,00	695.182.800,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	8.331.984.500,0 0	0,00	0,00	0,00	8.331.984.500,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0003	BAGIAN HUKUM	0,00	559.700.000,00	0,00	0,00	0,00	559.700.000,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0004	BAGIAN PEREKONOMIAN	0,00	517.565.400,00	0,00	0,00	0,00	517.565.400,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0005	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	383.238.000,00	0,00	0,00	0,00	383.238.000,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0006	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	368.121.800,00	23.660.000,00	0,00	0,00	391.781.800,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0007	BAGIAN ORGANISASI	0,00	646.629.200,00	0,00	0,00	0,00	646.629.200,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0008	BAGIAN UMUM	0,00	7.498.186.640,0 0	331.916.110,00	0,00	0,00	7.830.102.750,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0009	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0,00	50.473.959.696, 00	0,00	0,00	0,00	50.473.959.696,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0010	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	1.615.352.000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.615.352.000,00
4	01	4.01.2.07.0.00.28.0011	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	221.081.800,00	0,00	0,00	0,00	221.081.800,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	36.881.586.205, 00	103.500.000,00	0,00	0,00	36.985.086.205,00
4	02	4.02.0.00.0.00.27.0000	Sekretariat DPRD	0,00	36.881.586.205, 00	103.500.000,00	0,00	0,00	36.985.086.205,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.086.803.110.477 ,00	50.697.727.911, 00	333.672.597,00	2.150.745.082, 00	172.237.804.100 ,00	225.419.949.690,0 0
5	01		PERENCANAAN	0,00	6.432.816.473,0 0	34.972.597,00	0,00	0,00	6.467.789.070,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.0.00.0.00.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	6.432.816.473,00	34.972.597,00	0,00	0,00	6.467.789.070,00
5	02		KEUANGAN	2.086.669.110.477,00	35.798.752.431,00	269.250.000,00	2.150.745.082,00	172.237.804.100,00	210.456.551.613,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	16.318.120.421,00	4.192.045.800,00	51.000.000,00	0,00	0,00	4.243.045.800,00
5	02	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.035.175.495.028,00	6.365.231.600,00	0,00	0,00	0,00	6.365.231.600,00
5	02	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.035.175.495.028,00	25.241.475.031,00	218.250.000,00	2.150.745.082,00	172.237.804.100,00	199.848.274.213,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	3.991.434.200,00	0,00	0,00	0,00	3.991.434.200,00
5	03	5.03.5.04.0.00.23.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	3.991.434.200,00	0,00	0,00	0,00	3.991.434.200,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	134.000.000,00	4.474.724.807,00	29.450.000,00	0,00	0,00	4.504.174.807,00
5	05	5.05.0.00.0.00.24.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	67.000.000,00	3.356.215.700,00	23.500.000,00	0,00	0,00	3.379.715.700,00
5	05	5.05.0.00.0.00.24.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	67.000.000,00	1.118.509.107,00	5.950.000,00	0,00	0,00	1.124.459.107,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	12.336.811.150,00	101.199.000,00	0,00	0,00	12.438.010.150,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	12.336.811.150,00	101.199.000,00	0,00	0,00	12.438.010.150,00
6	01	6.01.0.00.0.00.29.0000	Inspektorat Daerah	0,00	12.336.811.150,00	101.199.000,00	0,00	0,00	12.438.010.150,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	11.433.861.573,00	1.507.833.251,00	0,00	0,00	12.941.694.824,00
7	01		KECAMATAN	0,00	11.433.861.573,00	1.507.833.251,00	0,00	0,00	12.941.694.824,00
7	01	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sumber Jaya	0,00	709.385.820,00	0,00	0,00	0,00	709.385.820,00
		7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Tugu Sari	0,00	390.897.780,00	203.693.128,00	0,00	0,00	594.590.908,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Way Tenong	0,00	827.270.100,00	11.500.000,00	0,00	0,00	838.770.100,00
7 01 7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Fajar Bulan	0,00	279.627.400,00	200.403.504,00	0,00	0,00	480.030.904,00
7 01 7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Sekincau	0,00	1.024.199.580,00	304.628.607,00	0,00	0,00	1.328.828.187,00
7 01 7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Belalau	0,00	680.518.460,00	13.800.000,00	0,00	0,00	694.318.460,00
7 01 7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Batu Brak	0,00	600.646.200,00	23.500.000,00	0,00	0,00	624.146.200,00
7 01 7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Balik Bukit	0,00	948.660.733,00	22.750.000,00	0,00	0,00	971.410.733,00
7 01 7.01.0.00.0.00.35.0001	Kelurahan Pasar Liwa	0,00	296.410.200,00	304.097.120,00	0,00	0,00	600.507.320,00
7 01 7.01.0.00.0.00.35.0002	Kelurahan Way Mengaku	0,00	406.482.400,00	265.275.892,00	0,00	0,00	671.758.292,00
7 01 7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Sukau	0,00	627.433.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	651.933.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Suoh	0,00	564.633.900,00	16.750.000,00	0,00	0,00	581.383.900,00
7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Gedung Surian	0,00	577.758.200,00	17.635.000,00	0,00	0,00	595.393.200,00
7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Kebun Tebu	0,00	584.794.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	606.844.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Air Hitam	0,00	564.324.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	581.074.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Pagar dewa	0,00	585.511.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	594.011.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Batu Ketulis	0,00	626.857.900,00	19.500.000,00	0,00	0,00	646.357.900,00
7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	550.571.900,00	13.500.000,00	0,00	0,00	564.071.900,00
7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Lumbok Seminung	0,00	587.879.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	606.879.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	30.795.124.619,00	53.025.100,00	0,00	0,00	30.848.149.719,00
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	30.795.124.619,00	53.025.100,00	0,00	0,00	30.848.149.719,00
8 01 8.01.0.00.0.00.26.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	30.795.124.619,00	53.025.100,00	0,00	0,00	30.848.149.719,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.28.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001	Kelurahan Sekincau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.126.974.097.567,00	763.658.896.869,00	158.744.965.868,00	2.150.745.082,00	172.237.804.100,00	1.096.792.411.919,00


 Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
 WUKMAN

OPD	KABAG HUKUM
7	1

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.091.795.802.539,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00	
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.338.534.672,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.633.991.778,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.024.057.773.348,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	950.422.205.500,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	615.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.160.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.328.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.643.512.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.431.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.830.165.900,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.274.301.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.116.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.442.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.878.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.456.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.625.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama : Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian : Jumlah prasarana sekolah menengah pertama dibangun : Jumlah prasarana sekolah menengah pertama direhab : Jumlah sarana (Meubelair sekolah) menengah pertama yang tersedia : Jumlah sarana (TIK sekolah) menengah pertama yang tersedia : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	515.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.373.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	473.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.464.900,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.521.739.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.038.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.559.239.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.130.120.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.174.841.900,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.214.068.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.824.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.147.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.573.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	469.153.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	547.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.465.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.448.540.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.925.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam mengelola Dana BOP pada Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.775.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	566.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.694.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.503.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	765.060.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.581.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.349.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.807.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan		
Kegiatan	: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.359.000,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan		
Kegiatan	: 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.209.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	232.231.862.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.736.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.729.600,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.474.600,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.812.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.901.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.898.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.869.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.313.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.910.800,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	34.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.510.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Puskesmas terakreditasi madya BOR RSUD AU Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA RSUD AU Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian IDL Persentase capaian 5 pilar STBM		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana penunjang pelayanan kesehatan RSUD AU Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUD AU Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.038.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.511.205.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.470.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.526.135.045,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.924.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.450.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.844.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.742.188,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.592.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.943.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.687.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.169.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.459.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.915.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.484.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.501.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.640.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.349.517,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.517.238.280,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.328.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.135.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.167.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.755.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.935.500,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.670.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang diukur melalui Indikator Nilai Mutu (INM) Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.572.500,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Persentase SDM RSUDAU yang memenuhi standart Persentase Fasyankes memenuhi SDM sesuai Standar		
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.325.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.447.285.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.806.800,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Tingkat Kabupaten/Kota Yang dikembangkan Mutu dan ditingkatkan kompetensinya		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.043.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, serta UMOT yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.154.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Persentase SPPIRT yang diterbitkan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.285.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana produksi IRTTP yang memenuhi ketentuan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.305.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.611.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga melaksanakan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.133.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.976.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.746.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.804.200,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	42.728.385.599,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.272.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.494.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.757.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.590.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.252.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.299.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.796.400,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.210.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.754.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.898.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	146.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.657.400,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.814.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0001 RSUD Alimuddin Umar		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular ALOS RSUD AU Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Prevalensi Balita Wasting Akreditasi RSUD AU Utama BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana penunjang pelayanan kesehatan RSUD AU Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUDAU Persentase Tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.283.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.150.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.057.800,00	

Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang diukur melalui Indikator Nilai Mutu (INM) Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.608.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase SDM RSUDAU yang memenuhi standart Persentase Fasyankes memenuhi SDM sesuai Standar Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.006.375.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.019.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.800.467.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.076.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.381.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.070.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.246.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.355.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dan disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	28.920.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.810.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.550.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.684.917.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.010.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	61.401.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Batu Brak		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian IDL Akreditasi RSUD AU Utama Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyanikes Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.372.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.085.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.453.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	118.326.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.741.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.137.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.675.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.248.600,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.668.057,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Batu Ketulis		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: BOR RSUDAU ALOS RSUD AU Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase persalinan di fasyankes Akreditasi RSUD AU Utama Prevalensi Balita Wasting Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.537.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.310.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.745.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.643.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	123.882.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.602.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.020.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.489.400,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.766.640,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.859.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Sekincau		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: ALOS RSUD AU Persentase Puskesmas terakreditasi madya BOR RSUDAU Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Akreditasi RSUD AU Utama Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.737.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.312.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.646.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.425.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	159.341.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.788.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.212.200,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.925.500,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.365.408,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.587.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Air Hitam		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Akreditasi RSUD AU Utama Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana perunjang pelayanan kesehatan RSUD AU Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUDAU Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	115.657.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.147.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.840.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.507.000,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.077.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.899.153,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.600.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Fajar Bulan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.887.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.261.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.978.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	120.847.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.021.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.439.000,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.838.500,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.649.867,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.801.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Buay Nyerupa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Nilai SPM KIA Gizi Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.907.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.651.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.776.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	155.861.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.031.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.650.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.768.000,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.401.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.868.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.022.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Sumber Jaya		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian SPA RSUDAU Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.788.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.279.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.217.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.626.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	131.105.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.375.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.540.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.440.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.360.381,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.952.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Kebun Tebu		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU BOR RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUD AU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.970.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.632.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.241.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.576.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	122.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.492.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.465.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.940.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.425.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.748.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.243.220,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.907.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Bandar Negeri Suoh		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: ALOS RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Akreditasi RSUD AU Utama Persentase persalinan di fasyanikes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya BOR RSUDAU		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.417.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.551.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.186.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	150.429.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.916.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.857.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.760.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.996.000,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.520.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.443.713,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.847.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Gedung Surian		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE Persentase Masyarakat memiliki JKN Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.445.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.597.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	99.667.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.452.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.727.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.710.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.309.000,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.576.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.787.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.828.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Liwa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Prevalensi Balita Wasting Persentase persalinan di fasyanikes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.908.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.558.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	117.778.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.526.650,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.620.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.016.800,00	

Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.322.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.638.454.887,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.978.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Lombok		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase persalinan di fasyankes BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian IDL Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Puskesmas melaksanakan SIK Persentase Puskesmas terakreditasi madya Akreditasi RSUD AU Utama ALOS RSUD AU Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.438.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.397.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	124.235.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.219.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.465.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.290.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.479.200,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.833.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.192.330,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.020.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Kenali		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: ALOS RSUD AU Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUDE Persentase Masyarakat memiliki JKN Prevalensi Balita Wasting Persentase persalinan di fasyankes Akreditasi RSUD AU Utama BOR RSUDAU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase Capaian IDL Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Puskesmas melaksanakan SIK		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.098.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.627.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.276.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	126.225.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.529.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.008.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.567.200,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.779.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.550.960,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.621.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Pagar Dewa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Capaian SPA RSUD AU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase Capaian IDL Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular Akreditasi RSUD AU Utama Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK ALOS RSUD AU BOR RSUD AU Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Puskesmas terakreditasi madya Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.460.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.632.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.907.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	145.552.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.043.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.460.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.001.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Persentase Keluarga berPHBS		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.019.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.823.157,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.297.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Srimulyo		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: ALOS RSUD AU Persentase Masyarakat memiliki JKN Persentase persalinan di fasyankes Persentase Puskesmas melaksanakan SIK BOR RSUDAU Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular Persentase Capaian SPA RSUDAU Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara Prevalensi Balita Wasting Persentase Capaian IDL Persentase Capaian SPA Puskesmas Persentase Puskesmas terakreditasi madya Akreditasi RSUD AU Utama Persentase capaian 5 pilar STBM Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan Jumlah Peserta JKN Jumlah Puskesmas Terakreditasi Nilai SPM KIA Gizi Nilai SPM Penyakit Menular Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ Nilai SPM (RSUD AU) Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU) Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.169.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.205.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.643.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.317.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	146.212.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.280.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.300.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.936.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Keluarga berPHBS Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.703.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.604.645,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.708.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	610.483.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.362.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		

Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	704.751.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.337.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.171.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Akses Air Bersih		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.388.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.600.900,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi		

Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.214.757,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.945.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.682.411,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.684.689.545,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.858.600,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	644.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.797.385.582,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.445.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.985.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	288.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.419.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.996.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.300.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan		
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.748.200,00	

Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan		
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.957.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.820.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.551.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.729.558.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.245.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.010.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.070.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.500.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.838.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.011.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.686.919,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah		
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.502.246,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan rumah Layak Huni		
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.800.000,00	

Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.644.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.374.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.891.500,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.369.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.994.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
Kegiatan	: 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.710.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.814.491.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.870.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.334.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.516.370.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.180.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.359.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.675.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.190.000,00	

Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.477.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.25.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.25.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Respon time Tanggap Bencana Persentase desa tangguh		
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.969.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.872.200,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.930.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.846.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.896.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.835.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.796.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.969.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.176.409.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.078.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.015.000,00	

Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.334.400,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.150.000,00	

Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.05.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.05.0000 Dinas Sosial		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: IKM Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.688.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.334.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.510.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.440.000,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: Persentase komponen utama taman makam pahlawan		
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.941.800,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.445.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.511.828.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.275.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.161.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.854.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	

Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.897.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.932.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.340.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.731.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.124.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.845.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.013.000,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.412.400,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.994.200,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.878.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.384.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.774.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.444.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.216.496.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.903.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.946.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.634.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.467.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.406.200,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.194.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.500,00	

Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.193.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	130.000.000,00	

Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat daerah ,Dunia Usaha, Organisasi masyarakat yang mendapatkan Advokasi Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.795.500,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: % Kader yang dibina % Kader yang dibina % keluarga berkualitas		
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi KG (kesetaraan gender) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.048.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta yang ikut dalam pembentukan PATBM dan jumlah PATBM yang terbentuk Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.588.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	120.000.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Hak-hak anak		
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.047.700,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif % perlindungan khusus anak		
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota		

Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai Sakip OPD		
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.262.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.147.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.686.834.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.534.600,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum PPKBPPPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.748.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.371.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.852.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.064.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.685.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.120.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak		
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		

Indikator Hasil	: persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir		
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.359.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: % perlindungan khusus anak Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif		
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.998.100,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.07.0000 Dinas Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.07.0000 Dinas Ketahanan Pangan		
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Angka Ketersediaan Energi dan Angka Protein Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein		
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Kemandirian pangan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.142.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.783.500,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Skor PPH Konsumsi Skor PPH Konsumsi		
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsi dan perbandingan harga gabah di tingkat petani		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
Indikator Keluaran	: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi dan Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.156.000,00	

Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan Jumlah Penanganan Desa Rawan Pangan prioritas 1, 2 dan 3		
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.766.400,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.337.200,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan		
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengelolaan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.191.473.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.181.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah paket penyediaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.251.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.195.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.585.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.464.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kasus yang Tertangani		
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.430.000,00	

Program	: 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
Indikator Hasil	: Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Inventarisasi penyelesaian tanah kosong		
Kegiatan	: 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.380.000,00	
Kegiatan	: 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.498.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensi Terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.319.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.125.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.553.805.915,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.798.223.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.750.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Sampah yang Terkelola/Ton/Tahun		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.355.207.000,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.155.208.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.261.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.818.200,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.417.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Penyediaan/Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.858.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.960.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.793.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.096.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.120.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.251.020,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.486.870,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.116.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.037.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.255.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.228.000,00	

Kegiatan	: 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.370.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.844.100,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Profil Kependudukan Kabupaten Lampung Barat		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.323.700,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.372.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapoan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.017.485.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana kebutuhan barang milik SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.015.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.648.400,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.505.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.556.900,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.098.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.799.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.09.0001 UPT Disdukcapil Way Tenong		
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.195.400,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata		
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa		

Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.101.766.600,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat		
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan perdesaan		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.459.300,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pekon Tertib Administrasi		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.188.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.585.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.983.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.595.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.236.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.768.600,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.289.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.576.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.276.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.799.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai Sakip Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.299.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.199.243.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.800,00	

Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.149.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.251.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.184.000,00	

Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.562.580,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.991.250,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: % OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan		
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK) Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.362.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.224.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga mlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Peserta KB Aktif (PA) MKJP % PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need % Pekon yang menjadi kampung KB		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP peserta KB Baru		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Unit Sarana penunjang pelayanan KB Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya Pelaksanaan Pelayanan KB di Faskes dan Jejaringnya		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.214.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi / Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.500.000,00	

Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.12.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.12.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar		
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.192.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.704.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.543.050,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.041.600,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.715.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.991.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.346.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.830.000,00	

Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.277.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.001.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.618.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.214.549.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.576.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.648.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.256.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.042.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.860.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.791.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.821.350,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.910.750,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.090.350,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.824.335,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.494.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.034.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.065.179.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.221.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.629.400,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Egovernment		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.898.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.149.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai Sakip Perangkat daerah Kominfo		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.045.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.789.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.757.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.684.761.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.903.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.333.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.658.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.803.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.558.600,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.975.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.061.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.300.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.318.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.801.900,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Jumlah Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%		
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.936.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	

Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase UMKM terfasilitasi Persentase wirausaha pemula		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.278.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.294.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.754.100,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag		
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.630.446.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.253.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.292.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.319.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.893.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.163.100,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.115.420,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.175.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Minat Investasi		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	

Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.585.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.178.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTP Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTP		
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.346.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.847.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.627.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.759.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.254.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.087.293.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.101.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.800,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.952.800,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.138.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.678.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.987.200,00	

Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.800.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.559.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.187.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyelesaian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.824.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	110.000.000,00	

Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.082.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.490.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	915.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.569.200,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		

Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.269.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.299.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.903.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.926.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.012.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.902.025.795,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.963.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.031.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.244.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.344.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.165.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.407.200,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.996.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LBDA, PDRB, Statistik Sektoral		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.287.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.714.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Persentase Jenis Komunikasi Sandi yang Diamankan		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.136.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.493.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.166.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.314.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.347.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	535.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	147.500.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah		
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan		
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.564.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.201.300,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.926.400,00	
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)		
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.966.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.314.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.160.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.824.000,00	

Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.17.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.17.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.033.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.501.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.976.633,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.588.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.281.500,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.283.774.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.046.000,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.249.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.973.769.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.239.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.085.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.800.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Organisasi yang Disediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.451.500,00	

Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Kualitas Pengelolaan Arsip		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.271.500,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.554.000,00	

BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.18.0000 Dinas Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.18.0000 Dinas Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.786.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.998.500,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.049.100,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usahan Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi, pembinaan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.601.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.869.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.917.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.291.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.659.650,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.210.000,00	

Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.603.000,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.013.700,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.697.800,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.182.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.573.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.645.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.561.075.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.296.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.043.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.210.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.816.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.491.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.028.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.550.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.551.900,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.488.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.820.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Hasil	: -		

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.894.610.370,00	
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.207.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	935.750.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.248.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.525.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.762.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.867.250,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan kelas Lanjut ke Madya Peningkatan kelas Madya ke Utama Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.861.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.187.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.117.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH		
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.890.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.783.182.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.031.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.843.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.797.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.230.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.271.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.186.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.396.200,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.798.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.467.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pembangunan prasarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase pengendalian penyakit zoonosis		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.588.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.486.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.830.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase pengendalian OPT		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.674.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase kelembagaan petani terbina		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.631.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.550.300,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.187.200,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan		
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.382.722.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perlengkapan Umum Perangkat Daerah yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.364.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.320,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.704.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.264.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.080.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi		
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.877.450,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.017.565.000,00	

Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: % rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting		
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.125.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: % Alat UTTP tertera sah		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.001.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	570.000,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: % Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya		
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.997.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		

Unit Organisasi	: 2.07.3.31.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.719.002.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.911.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	856.252.400,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.315.035.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.650.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0001 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.826.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.640.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.883.000,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.833.200,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.954.941.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.235.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.743.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0003 BAGIAN HUKUM		
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.825.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.557.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		

Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.509.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.946.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.109.800,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.366.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.482.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.390.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.131.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.180.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.810.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0007 BAGIAN ORGANISASI		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi		

Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.470.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.969.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.189.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0008 BAGIAN UMUM		
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.624.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.036.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.087.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.398.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.865.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.997.510,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.323.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.627.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.370.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.828.740,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.060.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.420.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.096.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	22.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.325.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.504.280,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	81.627.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.311.520,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0009 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.842.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.827.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.259.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.259.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	50.356.439.696,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.503.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.693.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.722.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0010 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.750.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.07.0.00.28.0011 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM DAN TENAGA KERJA		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan		
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.637.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.261.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.183.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat DPRD		

Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.023.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.682.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.471.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.105.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.887.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.887.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.855.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.965.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.571.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.041.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.764.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.139.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.919.100.800,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.194.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.343.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.173.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.491.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.707.400,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.712.706.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.579.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.972.879.000,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD		
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.205.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.292.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.725.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.046.369.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.448.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.570.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.520.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.226.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.590.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.312.000,00	

Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.269.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.155.800,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.365.375,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.191.130,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.922.113.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.064.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.656.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.158.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.250.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.436.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.800,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.177.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.912.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.690.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.742.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.312.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.710.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.457.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.620.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.352.597,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.988.600,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.976.250,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		

Indikator Hasil	: Persentase OPD yang mencapai target kinerja		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.441.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.924.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.774.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.418.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.920.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.031.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.190.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.777.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.979.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.811.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.278.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.899.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.504.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.308.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.364.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.751.500,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.803.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.345.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.900.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.643.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.901.000,00	

Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda		
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.751.424.303,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.292.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.793.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.617.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.006.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.509.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.676.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.063.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.530.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.494.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.444.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.294.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.973.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.075.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.729.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.852.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.945.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	22.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.711.300,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.187.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.040.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.794.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.732.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.952.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.452.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.258.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.161.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.120.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.231.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.838.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.029.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.638.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.201.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.286.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.172.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.845.021.100,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.392.783.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.045.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.042.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.064.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.449.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.752.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.287.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.051.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.326.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.354.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.895.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.745.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.979.497.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.445.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.904.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.983.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.131.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.564.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.675.265.280,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.240.676,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.686.050,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.23.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.23.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.909.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.509.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.711.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.962.500,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.621.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.664.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.905.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.840.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.229.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.559.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.762.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.852.500,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.166.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.301.975.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.865.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.501.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.294.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.543.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.123.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.640.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.122.600,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.24.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.24.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.561.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.509.107,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.950.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.844.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang		
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.137.820.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.229.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.298.900,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.29.0000 Inspektorat Daerah		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.29.0000 Inspektorat Daerah		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.077.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.523.000,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang tertangani. Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.896.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.640.500,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.811.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.551.000,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.867.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.249.698.750,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.636.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.456.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.197.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.011.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.199.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.468.900,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.190.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.500.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sumber Jaya		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sumber Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumberjaya		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.844.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.864.500,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah pekon mandiri Kecamatan Sumberjaya		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.217.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kecamatan Sumberjaya		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.063.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.528.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.630.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.257.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.257.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.147.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.247.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.971.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.182.900,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	403.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.601.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.731.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah paket penyediaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.532.220,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.607.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Organisasi	: null null		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0001 Kelurahan Tugu Sari		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.972.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.740.250,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.126.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.663.128,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.851.130,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.947.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Way Tenong		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Way Tenong		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.321.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	389.350.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.869.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.162.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.079.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.861.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Way Tenong		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0001 Kelurahan Fajar Bulan		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.403.504,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.778.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.122.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.211.400,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Sekincau		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Sekincau		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.094.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	389.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.891.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.825.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.339.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.312.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.826.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.112.500,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.249.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.365.500,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.909.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.350.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246.128.607,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.638.080,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.771.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.419.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.748.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.439.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Belalau		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Belalau		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.135.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.122.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.771.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	387.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.444.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.049.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.029.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.145.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.863.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.864.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.273.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.598.660,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.242.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.006.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.641.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.065.800,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.508.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.065.200,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.801.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.376.800,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.904.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.974.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Batu Brak		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Batu Brak		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.616.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.142.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.667.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.291.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.259.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	:-		

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.626.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.305.900,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.438.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: undefined		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	315.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.546.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.574.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.223.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.225.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.750.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.403.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.612.800,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Balik Bukit		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Balik Bukit		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.256.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.113.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.943.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.803.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	649.995.733,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.516.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.096.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.167.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.828.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.247.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.513.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.526.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.856.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.197.500,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.020.500,00	
Organisasi	: null null		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0001 Kelurahan Pasar Liwa		
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.273.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.395.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.392.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.962.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	304.097.120,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.848.000,00	

Organisasi	: null null		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0002 Kelurahan Way Mengaku		
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.144.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.202.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.085.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.582.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.098.500,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.847.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	255.275.892,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.732.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sukau		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sukau		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Sukau		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah pekon mandiri Kec Sukau		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Sukau		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Sukau		

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Sukau		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau		

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	358.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah paket penyediaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.558.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Suoh		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Suoh		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	287.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.264.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.491.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.086.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.803.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.215.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: +		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.988.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.190.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.078.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Gedung Surian		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Gedung Surian		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Kec Gedung Surian		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.798.600,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.472.700,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah pekon mandiri Kec Gedung Surian		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.021.200,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Perentase penurunan kasus gangguan keamanan Kec Gedung Surlan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.452.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.414.600,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kec Gedung Surlan		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.661.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.419.800,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec Gedung Surlan		

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.530.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.741.200,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.151.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.557.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.433.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.929.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.317.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	301.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.326.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.979.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah paket penyediaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.946.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.145.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.190.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Kebun Tebu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Kebun Tebu		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	306.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.927.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.225.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.717.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.238.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.075.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.035.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.932.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.307.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.507.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.158.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.146.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Air Hitam		

Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Air Hitam		
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.321.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	274.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.010.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.592.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.160.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Pagar dewa		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Pagar dewa		
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	310.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.071.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.563.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.432.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.255.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.395.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Batu Ketulis		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Batu Ketulis		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	354.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.946.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.559.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.839.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.086.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.665.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.034.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.689.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Bandar Negeri Suoh		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Bandar Negeri Suoh		
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.844.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.961.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	287.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.625.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	24.510.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		

Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	:-		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	:-		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.075.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.174.800,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.476.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.972.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.700,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.386.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.703.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Lumbok Seminung		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Lumbok Seminung		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.603.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.298.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.124.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.983.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	299.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.838.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.306.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.762.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.595.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.252.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.857.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.545.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.083.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.635.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.831.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.981.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.26.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.26.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.257.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.417.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		
Indikator Keluaran	: Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.147.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.288.740,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.525.100,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.547.500,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.954.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	22.501.338.329,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.055.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.987.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	382.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		

Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.842.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.103.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.310.400,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.793.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.297.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.761.430.250,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol		
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.884.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.078.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.068.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.527.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.664.800,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.641.969.700,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.542.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.563.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.494.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.234.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.872.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.163.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.596.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.530.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.329.900,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.846.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.915.272.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.915.272.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	



BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

